

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT**

NOMOR : 910/ 3245 /GPB/2022  
NOMOR : 900/452 /DPR- PB/2022  
TANGGAL : 05 DESEMBER 2022

**TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. PAULUS WATERPAUW, M.Si**  
Jabatan : **Pj. Gubernur Papua Barat**  
Alamat Kantor : **Jalan Brigjen Marinir Abraham O. Atururi Manokwari**  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat

2. a. Nama : **ORGENES WONGGOR, S.IP**  
Jabatan : **Ketua DPR Papua Barat**  
Alamat Kantor : **Jalan Brigjen Marinir Abraham O. Atururi Manokwari**

b. Nama : **RANLEY H. L. MANSAWAN, SE.**  
Jabatan : **Wakil Ketua I DPR Papua Barat**  
Alamat Kantor : **Jalan Brigjen Marinir Abraham O. Atururi Manokwari**

c. Nama : **H. SALEH SIKNUN, SE**  
Jabatan : **Wakil Ketua II DPR Papua Barat**  
Alamat Kantor : **Jalan Brigjen Marinir Abraham O. Atururi Manokwari**

d. Nama : **JONGKY R. FONATABA, SE, MM**  
Jabatan : **Wakil Ketua III DPR Papua Barat**  
Alamat Kantor : **Jalan Brigjen Marinir Abraham O. Atururi Manokwari**

e. Nama : **CARSTENSZ I.O MALIBELA, S.IP,**  
Jabatan : **Wakil Ketua IV DPR Papua Barat**  
Alamat Kantor : **Jalan Brigjen Marinir Abraham O. Atururi Manokwari**

sebagai Pimpinan DPR bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Papua Barat Tahun 2023, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Propinsi Papua Barat

Tahun 2023 yang disepakati bersama antara DPR dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPR Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat tentang Kebijakan Umum Anggaran APBD Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023, Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) per urusan dan OPD, Program dan Kegiatan, dan Belanja Tidak langsung serta rencana Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2023

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023.






Manokwari, 05 Desember 2022

Pj.GUBERNUR PAPUA BARAT

Selaku,  
WAKIL PERTAMA  
  
Drs. PAULUS WATERPAUW, M.Si



PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

Selaku,  
WAKIL KEDUA  
  
ORGENES WONGGOR, S.IP  
KETUA  
  
RANLEY H. L. MANSAWAN, SE.  
WAKIL KETUA I  
  
H. SALEH SIKON, SE  
WAKIL KETUA II  
  
JONGKY R. FONATABA, SE, MM  
WAKIL KETUA III  
  
CARSTENSZ I. O. MALIBELA, S.IP  
WAKIL KETUA IV



<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b><i>i</i></b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b><i>ii</i></b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara .....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. ....	2
<b>BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH</b> .....	<b>9</b>
3.1 Prioritas Daerah. ....	9
3.2 Matriks Prioritas Pembangunan .....	12
<b>BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN</b> .....	<b>50</b>
4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.....	50
4.2 Plafon Anggaran Belanja .....	51
<b>BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	<b>52</b>
5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	52
5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	52
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>54</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 .....	8
Tabel 2 Matriks Keselarasan Tujuan, Sasaran serta indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	13
Tabel 3 Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .....	22
Tabel 7 Plafon Belanja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2023 .....	51
Tabel 8 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 .....	53

## 1.1 Latar Belakang

Salah satu prosedur yang harus dilalui dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain perlu disusun prioritas serta plafon anggaran sebagai dokumen kebijakan politik menyangkut arah dan besaran alokasi untuk setiap program. Dokumen tersebut selanjutnya digunakan sebagai landasan penyusunan dokumen-dokumen anggaran selanjutnya seperti RKA-SKPD maupun RAPBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Papua Barat Tahun 2023 adalah merupakan salah satu instrument operasional tahunan keuangan daerah yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dan sasaran dari pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2023 – 2026. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2026. Arah kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 adalah dalam upaya mendukung target Nasional dalam pengendalian dampak Inflasi, Pengendalian Angka Stunting serta Beberapa Prioritas Daerah lainnya. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut tertuang ke dalam Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang tersebar diseluruh Perangkat Daerah di Provinsi Papua Barat sesuai dengan fungsinya.

Adapun tema RKPD propinsi Papua Barat Tahun 2023 adalah Mempercepat Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Meningkatkan Kualitas Sdm Unggul Yang Didukung Infrastruktur Dasar Dan Konektifitas Wilayah Serta Lingkungan Hidup Yang Lestari.

Dimana RKPD tahun 2023 Provinsi Papua Barat difokuskan pada 5 (lima) Prioritas Daerah yaitu : 1) Percepatan Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat; Percepatan Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat; 2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter Dan Kontekstual Papua Barat Serta Perlindungan Sosial; 3) Peningkatan Kualitas Infrastruk-Tur Dasar Dan Konektifitas Antar Wilayah

Serta Kualitas Pengelolaan Tatrung Daerah; 4) Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Dan Sumber Daya Alam Yang Berkradil Dan Berkelanjutan; 5) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pemanapan Tata Kelola Otonomi Khusus Berbasis Stabilitas Wilayah.

Oleh karena itu dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan RAPBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023 tetap disusun bertumpu pada kondisi kebutuhan riil masyarakat dan realita permasalahan sosial politik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang relatif sangat dinamis sejak kelahiran Provinsi Papua Barat hingga saat ini. Sejalan dengan hal tersebut juga perlu diperhatikan upaya untuk meningkatkan peran dan citra Provinsi Papua Barat dalam mengemban fungsi fasilitasi terhadap kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan termasuk upaya dukungan pembangunan yang maknanya dapat langsung dirasakan dan menyentuh kepentingan masyarakat secara umum baik di tingkat kabupaten/kota, distrik maupun kampung.

## **1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara**

Tujuan penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022 adalah :

- Mengembangkan Plafon Anggaran SKPD berdasarkan kemendesakan/keprioritasan terhadap penanganan isu strategis daerah;
- Mengembangkan skenario prioritas daerah yang berbasis pada agenda-agenda jangka menengah dan tahunan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat;
- Menciptakan acuan Prioritas dan Plafon Anggaran bagi seluruh pelaku pembangunan daerah dalam konteks penyusunan APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023.

## **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.**

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/6325/SJ Tentang Hasil Inventarisasi Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 31);

## BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan penerimaan pembiayaan dalam Kebijakan Umum APBD sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah  
Tahun Anggaran 2023**

NO	PENDAPATAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>640.881.515.682,00</b>	
4.1.01	Pajak Daerah	496.768.283.140,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	5.145.661.647,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.424.194.310,00	
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	103.543.376.585,00	
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>6.998.557.634.497,00</b>	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	6.998.557.634.497,00	
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>1.666.880.000,00</b>	
4.2.01	Pendapatan Hibah	1.666.880.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>7.641.106.030.179,00</b>	
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>255.000.000.000,00</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	255.000.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>630.999.999.938,00</b>	
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>7.641.106.030.179,00</b>	

### 3.1 Prioritas Daerah.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Papua Barat diwujudkan dengan mengkombinasikan agenda-agenda nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dengan agenda kebijakan daerah yang tertuang dalam RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2023 – 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2023 – 2026. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2026 tersebut dilaksanakan melalui mekanisme musrenbang yakni wahana untuk mempertemukan hasil perencanaan teknokratis – partisipatif yang dilakukan OPD Provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penyerasian perencanaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan sinergitas nasional. Hal tersebut dimaksudkan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk merealisasikan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rancangan Akhir RKPD ini pada akhirnya menjadi pedoman yang akan digunakan Pj Gubernur Papua Barat, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir di Tahun 2022 dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam penyusunan RKPD, pemerintah Provinsi Papua Barat menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dibahas bersama dengan DPRD;
4. Pendekatan atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kampung, Distrik, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Selain itu, proses penyusunan RKPD sebagai sebuah perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan beberapa pendekatan spesifik sebagai berikut:

1. Pendekatan perencanaan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial.
  - a. Pendekatan Holistik-Tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
  - b. Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
  - c. Pendekatan Spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
2. Kebijakan anggaran belanja *money follow program*.

Sesuai dengan uraian diatas, arah kebijakan tahun 2023 yang berpedoman pada RPD Provinsi Papua Periode 2023-2026 maka arah pembangunan Provinsi Papua Barat difokuskan dalam tema "MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN MENINGKATKAN KUALITAS SDM UNGGUL YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIFITAS WILAYAH SERTA LINGKUNGAN HIDUP YANG

LESTARI” yang didalamnya terkandung nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan dalam transformasi sosial ekonomi daerah didalam koridor Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat (yang ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua) dan beberapa regulasi lain yang menjadi payung hukum penyelenggaraan otonomi khusus Papua) serta memperkuat dukungan sektor untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi daerah setelah mengalami *stagnansis* yang cukup dalam yang diakibatkan oleh dampak Pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh sendi kehidupan masyarakat.

Adapun kebijakan Umum diatas, dijabarkan kedalam beberapa kebijakan prioritas Gubernur untuk Tahun 2023, yang diarahkan pada :

- Pembangunan Pendidikan khususnya menjawab minimnya ketersediaan guru baik secara kuantitas maupun kualitas, menekan tingginya angka putus sekolah
- Penanganan Stunting dengan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Bagi Orang Asli Papua, Penguatan Survelians Gizi, Penguatan Sistem Bantuan Sosial untuk pemenuhan Kebutuhan Gizi Bagi Keluarga Rentan serta intensifikasi Promosi Kesehatan melalui edukasi masyarakat.
- Pengendalian Inflasi yang merupakan kelanjutan program sesuai PMK 134/07.PMK/2022 tentang pengendalian inflasi daerah dengan menerapkan peningkatan operasi pasar, menggarap lahan tidur, pangan bersubsidi bagi masyarakat rentan, mobilisasi dan distribusi penyaluran pasokan pangan, peningkatan ketersediaan cadangan pangan daerah, perluasan Kerjasama daerah dan penyediaan subsidi transportasi.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat local terutama bagi Orang Asli Papua dengan Program Afirmasi Bangga Produk Lokal, yang didalamnya terdapat peningkatan kapasitas pengusaha Muda OAP, penyelenggaraan even pariwisata, hilirisasi komoditas unggulan papua, penciptaan dan penguatan sentra industry kecil dan menengah, dan promosi potensi investasi papua barat ditingkat nasional maupun internasional.
- Pembangunan infrastruktur yang difokuskan kepada dukungan aksesibilitas pusat perekonomian, aktivitas masyarakat maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- Dukungan terhadap proses transisi Provinsi Papua Barat Daya.

### **3.2 Matriks Prioritas Pembangunan**

Secara lebih jelasnya pengelompokan sasaran pembangunan berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan di Papua Barat dapat adalah sebagai berikut :



**Tabel 2 Matriks Keselarasan Tujuan, Sasaran serta indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023**

KODE	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja	Kondisi Akhir
				2020	2021	2023	
S7	Meningkatnya Perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,55	70,34	71,75	76,14
S8	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian (PDRB ADHK)	Persen	12,17	12,36	12,66	13,56
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	50,03 (th 2019)	48,07 (th 2020)	51,03	54,15
S9	Meningkatnya peran sektor Industri dan Perdagangan dalam Perekonomian Daerah	Kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian (PDRB ADHK)	Persen	7,03	7,23	7,43	8,03
		Kontribusi sektor industri pengolahan dalam perekonomian (PDRB ADHK)	Persen	31,16	30,60	30,80	31,60

KODE	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja	Kondisi Akhir
				2020	2021	2023	
S10	Meningkatnya Pembangunan Pertanian dan Ketahanan pangan	Nilai Tukar Petani	Indeks	100,78	100,86	100,99	101,38
S11	Meningkatnya investasi Daerah guna menopang pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Nilai Investasi	Rp. Triliun	N/A	14.709,34	15.077,07	16.236,35
		Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya per tahun	Persen	N/A	N/A	10,00	10,00
		Persentase UMKM yang meningkat omzetnya per tahun	Persen	N/A	N/A	10,00	10,00
		Kontribusi subsektor perikanan terhadap perekonomian (PDRB ADHK)	Persen	5,23	5,20	5,22	5,28

KODE	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja	Kondisi Akhir
				2020	2021	2023	
S12	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kampung	Persentase kampung yang berkembang, maju dan mandiri	Persen	7,26	8,61	12,06	22,41
<b>T3</b>	<b>Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah</b>	<b>Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)</b>	<b>Indeks</b>	<b>129,66</b>	<b>130,59</b>	<b>127,65</b>	<b>119,23</b>
S13	Meningkatnya konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)	Persen	56,74	67,42	69,28	79,36
S14	Meningkatnya Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih, Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua	Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Persen	78,71	77,89	81,09	84,79
		Cakupan Rumah Tangga yang	Persen	63,87	77,66	80,01	83,66

KODE	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja	Kondisi Akhir
				2020	2021	2023	
		mendapatkan akses air bersih					
S15	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni yang Berkelanjutan	Cakupan Rumah tangga yang memiliki rumah layak huni	Persen	N/A	56,83	58,25	62,73
S16	Meningkatnya Ketersediaan infrastruktur TIK yang menjangkau seluruh wilayah	Cakupan wilayah yang sudah terakses jaringan komunikasi (internet telepon seluler)	Persen	50,33 (th 2019)	69,34 (th 2020)	72,81	84,28
S17	Meningkatnya kesediaan infrastruktur perhubungan dan transportasi antar moda	Cakupan wilayah kabupaten/kota yang terhubung dengan moda transportasi darat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan wilayah kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00

KODE	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja	Kondisi Akhir
				2020	2021	2023	
		<p>pesisir yang terhubung dengan moda transportasi laut</p> <p>Cakupan wilayah kabupaten/kota yang terhubung dengan moda transportasi udara</p>					
			Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
S18	Meningkatkan ketersediaan energi dan ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	Persen	83,09	81,09	82,43	86,58
<b>T4</b>	<b>Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan serta berkelanjutan</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	<b>Indeks</b>	<b>81,8</b>	<b>79,25</b>	<b>77,82</b>	<b>78,45</b>
S19	Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	53.89 (th 2019)	56,15	56,25	56,35

KODE	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja	Kondisi Akhir
				2020	2021	2023	
		Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	N/A	77,17	77,82	78,45
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	92.64 (th 2019)	92,07	92,17	92,27
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	100.00 (th 2019)	95,51	98,58	98,75
S20	Meningkatnya pembangunan rendah karbon pada sektor kehutanan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan	tCO2/th	5.344.043		3.740.830	2.137.617
			Persen	100,00		70,00	40,00
S21	Meningkatnya partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	Cakupan kelompok masyarakat adat yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA	Persen	N/A	N/A	40,00	70,00

KODE	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja	Kondisi Akhir
				2020	2021	2023	
<b>T5</b>	<b>Meningkatkan kualitas manajemen dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan publik</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Indeks</b>	<b>B (th 2019)</b>	<b>C (th 2020)</b>	<b>B</b>	<b>A</b>
S22	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi kebijakan daerah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Skor	B (th 2019)	B (th 2020)	B	A
S23	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
S24	Meningkatnya profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Tingkat maturitas SPIP	Level	2	2	2	3
		Opini pengelolaan keuangan daerah	Level	WTP	WTP	WTP	WTP
S25	Meningkatnya Profesionalitas aparatur dalam menyelenggaraan Pemerintahan	Cakupan aparatur pemerintahan yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00

KODE	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja	Kondisi Akhir
				2020	2021	2023	
S26	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Pemerintah Daerah yang terimplementasi	Cakupan riset dan inovasi pelayanan publik yang terimplementasikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
		Capaian Kategori Innovation Government Award (IGA)	Kategori	N/A	N/A	Inovatif	Sangat Inovatif
		Capaian Kategori Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
S27	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Persentase Kab/ Kota yang Tertib Administrasi Kependudukan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
S28	Memperkuat distrik sebagai basis pembangunan wilayah	Cakupan distrik yang menjalankan	Persen	0,00	0,00	10,00	40,00



KODE	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja	Kondisi Akhir
				2020	2021	2023	
		kewenangan sesuai dengan Perdasu Distrik					
S29	Meningkatnya sistem informasi pemerintahan dan pembangunan berbasis kampung	Cakupan sistem informasi dan administrasi kampung yang terhubung dengan Kabupaten dan Provinsi	Persen	10,79	40,18	60,00	100,00
<b>T6</b>	<b>Meningkatkan stabilitas wilayah dan daya tahan masyarakat Provinsi Papua Barat</b>	<b>Indeks Demokrasi Indonesia</b>	<b>Indeks</b>	<b>57,62 (th 2019)</b>	<b>61,76 (th 2020)</b>	<b>63,00</b>	<b>70,00</b>
S30	Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	144,05 (th 2019)	144,05 (th 2020)	142,05	136,05
S31	Meningkat kententraman dan harmonisasi keragaman dalam masyarakat	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	82,1 (th 2019)	80,20	81,00	85,00

Sumber : RKPD Tahun 2023 Provinsi Papua Barat 2023

**Tabel 3 Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023**

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN
						2023
<b>TUJUAN 1:</b> Meningkatkan kualitas SDM unggul berkarakter dan kontekstual Papua Barat serta perlindungan sosial						
<b>S1</b>	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	<b>S1.1</b>	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang merata	Penguatan sistem rujukan dan penyediaan fasilitas kesehatan rujukan sesuai pemetaan kapasitas dan kondisi geografis		
				Percepatan akreditasi dan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar pada fasilitas pelayanan kesehatan		
				Perluasan cakupan dan pengembangan layanan telemedicine dan pembangunan puskesmas di distrik tanpa puskesmas		
				Perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bergerak di daerah sulit akses		

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN
					2023
				Pengembangan layanan unggulan di RS berdasarkan kondisi epidemiologis dan kebutuhan masyarakat setempat	
				Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan rumah sakit rujukan dan layanan kesehatan pada penduduk terdampak bencana	
				Perluasan layanan dan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang bersinergi dengan program lain yang melengkapi paket manfaat JKN	
		<b>S1.2</b>	Memenuhi Kebutuhan Tenaga Kesehatan sesuai standar kualitas dan standar jumlah secara merata dengan mengutamakan tenaga kesehatan OAP	Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan melalui afirmasi pendayagunaan lulusan tenaga kesehatan terutama untuk OAP dalam bentuk ikatan dinas, penugasan khusus dan program lainnya.	

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN
						2023
				Perluasan cakupan beasiswa untuk pendidikan tenaga kesehatan bagi OAP disertai dengan penempatan wajib pasca kelulusan		
				Peningkatan kualitas tenaga Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan		
				Pengembangan skema insentif dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang berbasis beban kerja dan kondisi geografis lokasi penugasasn		
		<b>S1.3</b>	Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Kesehatan Reproduksi	Peningkatan cakupan dan kualitas persalinan di fasilitas kesehatan serta pelayanan antenatal, neonatal dan pascapersalinan dengan tenaga kesehatan terlatih penguatan sistem rujukan maternal dan pendampingan ibu hamil dan balita komplikasi		
		Peningkatan jumlah dan kapasitas puskesmas mampu PONEK dan RS Mampu PONEK				
		Perluasan cakupan imunisasi dasar Lengkap				
		Penguatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi				

SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN
				2023
		<b>S1.4</b> Meningkatkan cakupan pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular	Intensifikasi promosi kesehatan melalui edukasi masyarakat dengan prinsip kontekstual budaya Papua	
			Peningkatan penemuan kasus melalui deteksi dini dan penemuan kasus penyakit menular secara aktif maupun pasif	
			Peningkatan penanganan kasus melalui terapi segera dan tepat serta pemantauan pengobatan	
			Penguatan sistem surveilans terpadu berbasis laboratorium	
		<b>S1.5</b> Meningkatkan Akses, Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Perbaikan distribusi alat Kesehatan, obat dan vaksin untuk mencukupi kebutuhan seluruh fasilitas kesehatan	
			Peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan pengelolaan kefarmasian dan alat kesehatan di tingkat provinsi	

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN
						2023
		<b>S1.6</b>	Meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif	Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan untuk pembudayaan masyarakat hidup sehat		
				Penguatan regulasi gerakan masyarakat untuk membudayakan hidup sehat		
		<b>S1.7</b>	Mengoptimalkan pengendalian penduduk dan pelayanan Keluarga Berencana	(Germas) dan meningkatkan kualitas lingkungan sehat serta keterjangkauan pilihan pangan sehat		
				Peningkatan kemandirian dan kapasitas masyarakat dalam menyelenggarakan UKBM terutama Posyandu dan Posbindu PTM		
				Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		
				Fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan kabupaten/kota dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB		

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN
					2023
				Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	
				Penguatan akses dan kualitas pelayanan KB	
<b>S2</b>	Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan	<b>S2.1</b>	Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Penguatan pebelajaran berbasis penguasaan ketrampilan abad 21	
				Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing global	
		<b>S2.2</b>	Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan wajib belajar 12 tahun	Penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata	
				Pemerataan memperoleh Pendidikan tinggi berkualitas terutama untuk	
				bidang-bidang yang menunjang pembangunan Papua Barat	
				Penyelenggaraan sekolah berpola asrama dan sekolah unggulan yang berkualitas	
Peningkatan budaya belajar untuk meningkatkan pentingnya pendidikan bagi masyarakat					

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN
						2023
		<b>S2.3</b>	Menjamin penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup yang berbasis komunitas (lembaga-lembaga agama, adat dan sosial lainnya)	Peningkatan penyelenggaraan pendidikan ketrampilan, kecakapan hidup dan literasi dengan fokus pada kelompok usia prioritas, OAP dan perempuan		
				<b>S2.4</b>	Meningkatkan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan	Pemenuhan tenaga pendidik serta pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang diprioritaskan untuk OAP
peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik						
		<b>S2.5</b>	Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan perpustakaan dan kearsipan	Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan daerah		
				Pengelolaan arsip daerah dengan mengedepankan penggunaan teknologi informasi		
				Peningkatan kapasitas tenaga serta manajemen kearsipan		



SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN
						2023
S3	Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	S3.1	Mengarusutamakan isu gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak		
				Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan untuk Perencanaan dan		
				Penganggaran yang Responsif Gender dan Hak-hak Anak		
		S3.2	Meningkatkan cakupan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak	Penguatan Layanan Terpadu di bidang perlindungan perempuan dan anak di tingkat kabupaten/kota		
				Peningkatan cakupan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan pelibatan pemangku kepentingan terkait dan berdasarkan kondisi sosial budaya setempat		
				Peningkatan cakupan dan kualitas penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten/kota		
				Penentuan kampung layak anak secara merata		
				Peningkatan cakupan dan kualitas layanan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus		

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN
					2023
<b>S4</b>	Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga	<b>S4.1</b>	Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pendampingan Kepemudaan dan Olahraga	Penguatan tatakelola pembudayaan olahraga di masyarakat	
				Peningkatan kualitas pembinaan olah raga pendidikan dan olah raga prestasi	
				Pembinaan organisasi kepramukaan dalam mengembangkan kapasitas organisasi dan pelaksanaan kegiatan	
<b>S4.2</b>	Mengembangkan kapasitas kepramukaan	<b>S4.3</b>	Meningkatkan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif sehingga memiliki daya saing yang tinggi	Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan serta kegiatan ekonomi mandiri	
<b>S5</b>	Menurunnya angka stunting	<b>S5.1</b>	Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin	Penguatan Surveilans Gizi di tingkat kabupaten/ kota	
				Penguatan sistem bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan gizi bagi keluarga miskin dan rentan	
				Penguatan pendidikan gizi melalui diversifikasi pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga	
				Peningkatan peran PKK dalam pencegahan stunting	

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN
						2023
				Peningkatan cakupan dan kualitas pembinaan Keluarga Sejahtera dalam Pengasuhan 1000 HPK		
<b>S6</b>	Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial terutama bagi OAP	<b>S6.1</b>	Menyelenggarakan Perlindungan sosial OAP	Pengembangan program perlindungan sosial afirmatif bagi anak-anak dan lansia OAP		
				Mendorong sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan percepatan penurunan kemiskinan		
				Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses pembiayaan		
		<b>S6.2</b>	Meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar dan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan	Peningkatan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN
					2023
				Fasilitasi penyediaan sarana sosial seperti panti sosial yang dimiliki oleh provinsi	
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penananganan masalah kesejahteraan sosial	
				Pengembangan jaminan sosial bagi PMKS	
<b>TUJUAN 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat</b>					
<b>S7</b>	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif	<b>S7.1</b>	Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal	Revitalisasi SMK dan perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	
				Perluasan kesempatan pemagangan dan strategi penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi	
				Penguatan peran kabupaten/kota dalam koordinasi kerjasama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi	
				Upskilling dan reskilling pendidik dan instruktur vokasi	
				Penguatan peran praktisi industri dalam pembelajaran dan pengajaran vokasi	
				Penguatan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk informasi pasar kerja, termasuk Identifikasi menyeluruh atas skema sertifikasi kompetensi sesuai potensi daerah bagi OAP	

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN
					2023
		<b>S7.2</b>	Membangun pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (skill development center)	Pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan keahlian dan keterampilan tenaga kerja (Balai Latihan Kerja)	
				<b>S7.3</b>	Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda Papua
		Perluasan konsultasi dan inkubasi bisnis, serta pelatihan dan pendampingan keterampilan wirausaha terutama pengusaha muda OAP			
		Pelatihan literasi dan akses pasar digital bagi pengusaha terutama pengusaha muda OAP			
		Pendampingan wirausaha untuk mengakses permodalan			
		<b>S8</b>	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat	<b>S8.1</b>	Pengembangan destinasi wisata alam, bahari, budaya, dan minat khusus yang berkelanjutan
Penyelenggaraan event rutin dan atraksi pariwisata					
Pengembangan promosi pariwisata					

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN
						2023
		<b>S8.2</b>	Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pariwisata	Pembentukan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pelaku kepariwisataan		
				Peningkatan SDM pariwisata terutama OAP melalui pendidikan dan pelatihan		
<b>S9</b>	Meningkatnya peran sektor industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah	<b>S9.1</b>	Menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mengembangkan koperasi	Pendampingan pelaku usaha mikro kecil untuk mengakses kredit murah seperti kredit usaha rakyat (KUR), kredit ultra mikro (UMi), dan lainnya		
				Pengembangan kemitraan usaha strategis antara usaha mikro kecil (UMK) dengan usaha menengah besar (UMB) berbasis komoditas unggulan		
				Pelatihan dan pendampingan literasi digital bagi pelaku UMKM		
				Digitalisasi UMKM melalui perluasan akses pasar daring, pembiayaan berbasis digital, dan tata kelola manajemen usaha berbasis digital		

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN	
						2023	
				Penguatan kelembagaan koperasi melalui pelatihan dan pendampingan kepada pengurus dan anggota koperasi			
				Pengembangan akses permodalan bagi UMKM			
				Penciptaan dan penguatan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal dan memprioritaskan OAP			
		<b>S9.2</b>	Meningkatkan peran wilayah Papua dalam perdagangan, baik dalam lingkup nasional, regional, dan global			Penguatan kebijakan afirmasi terhadap ekspor internasional bagi komoditas unggulan strategis Papua	
						Penguatan kerjasama ekonomi dalam rangka membuka peluang pasar nasional, regional, dan global	
						Penguatan dukungan regulasi ekspor komoditas strategis Papua menuju pasar nasional, regional, dan global	
						Hilirisasi komoditas unggulan Papua yang memenuhi standar internasional	

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN
						2023
<b>S10</b>	Meningkatnya pembangunan pertanian dan ketahanan pangan	<b>S10.1</b>	Pengembangan kawasan pengembangan ekonomi Domberay dan Bomberay yang berfokus pada sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, dengan didukung oleh sektor hortikultura, kelautan dan perikanan, serta industri, perdagangan, dan jasa	Pengembangan balai benih pertanian, peternakan, dan perikanan		
				Penyediaan tenaga penyuluh		
				Peningkatan SDM sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta industri, perdagangan, dan jasa melalui pendidikan dan pelatihan		
				Pengembangan kelembagaan petani, peternak, dan nelayan		
				Pengembangan industri tanaman pangan, perkebunan, peternakan, serta perdagangan dan jasa		
				Pengembangan rumah produksi		
				Pengembangan distribusi pemasaran		
<b>S11</b>	Meningkatnya investasi daerah guna menopang pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	<b>S11.1</b>	Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian wilayah	Peningkatan kepastian kepemilikan lahan melalui deliniasi hak ulayat untuk menunjang investasi		
				Penyusunan peta potensi investasi di setiap wilayah adat		
				Fasilitasi penyusunan regulasi kemudahan berinvestasi		
				Promosi potensi investasi Papua di tingkat nasional maupun internasional		



SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN
						2023
<b>S12</b>	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kampung	<b>S12.1</b>	Meningkatkan jangkauan pendataan kampung dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, termasuk data terpilah OAP	Peningkatan jangkauan pendataan kampung yang diiringi pemutakhiran pendataan kampung secara berkala		
				Pemanfaatan sistem administrasi kampung dalam mendukung verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial serta dalam perencanaan dan penargetan program penanggulangan kemiskinan seperti perlindungan sosial OAP, layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat		
<b>TUJUAN 3: Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah</b>						
<b>S13</b>	Meningkatnya konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas	<b>S13.1</b>	Peningkatan jaringan jalan provinsi dalam rangka percepatan konektivitas antar wilayah	Pembangunan dan peningkatan Jalan dan Jembatan yang menghubungkan antar kabupaten		
				Pembangunan dan pemeliharaan irigasi dan drainase		
<b>S14</b>	Ketersediaan serta pengelolaan air bersih, sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	<b>S14.1</b>	Peningkatan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air	Pelestarian dan perlindungan terhadap Sumber Daya Air		
				Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih		

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN
						2023
<b>S15</b>	Ketersediaan rumah layak huni yang berkelanjutan	<b>S15.1</b>	Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan	Penataan kawasan permukiman kumuh		
				Penyusunan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang berkualitas		
				Penyediaan Bantuan Rumah Layak Huni bagi masyarakat kurang mampu		
		<b>S15.2</b>	Peningkatan penataan infrastruktur bangunan	Pendataan kelengkapan administrasi perijinan pendirian bangunan		
				Penataan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		
<b>S16</b>	Ketersediaan infrastruktur TIK yang menjangkau seluruh wilayah	<b>S16.1</b>	Peningkatan koneksitas jaringan komunikasi, data dan persandian pelayanan berbasis IT	fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi seluler		
				Pengembangan inovasi pelayanan pemerintah daerah berbasis IT		
				Pengembangan sarana, prasarana, dan SDM pengelolaan persandian daerah serta penguatan keamanan informasi persandian		

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN
						2023
<b>S17</b>	Meningkatnya kesediaan infrastruktur perhubungan dan transportasi antar moda	<b>S17.1</b>	Pengembangan sistem jaringan transportasi massal yang handal dan modern	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi Darat, Laut, Udara yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis		
<b>S18</b>	Meningkatkan ketersediaan energi dan ketenagalistrikan	<b>S18.1</b>	Peningkatan akses layanan listrik yang memenuhi standar	Perluasan jangkauan pelayanan listrik untuk kepentingan aktivitas ekonomi, pelayanan publik dan rumah tangga hingga ke pelosok		
				Perumusan grand design pemanfaatan sumber daya alam untuk energi baru terbarukan		
				Penertiban dan pengendalian perizinan pengelolaan energi		
<b>TUJUAN 4: Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan serta berkelanjutan</b>						
<b>S19</b>	Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<b>S19.1</b>	Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Peningkatan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara		
				Meningkatkan kualitas tutupan lahan		
				Peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik, serta kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim		

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN
						2023
				Penataan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup		
				Pengelolaan persampahan berorientasi 3R (dari hulu ke hilir)		
				Peningkatan sarana dan prasarana persampahan maupun TPA Regional		
<b>S20</b>	Meningkatnya pembangunan rendah karbon	<b>S20.1</b>	Peningkatan aktivitas dengan emisi GRK yang rendah	Meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		
				Mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan		
				Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan		
<b>S21</b>	Meningkatnya partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	<b>S21.1</b>	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam	Sosialisasi dan pelatihan masyarakat adat dalam pemanfaatan dan pengeolaan lingkungan		
				Pemberiaan penghargaan kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup		
				Penetapan masyarakat hukum adat		
		<b>S21.2</b>	Peningkatan tertib tata kelola pertanahan	Penyediaan lokasi untuk program strategis provinsi		
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan		

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN
			2023
<b>TUJUAN 5: Meningkatkan kualitas manajemen dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan public</b>			
<b>S22</b> Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi kebijakan daerah	<b>S22.1</b>	Meningkatkan kordinasi dan sinergisitas penyelenggaraan pemerintahan, antar bidang dan sektor, antar wilayah maupun antar tingkatan pemerintahan	Mengembangkan kerjasama dan kemitraan yang harmonis dengan berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah di Provinsi Papua Barat
			Memantapkan koordinasi dan sinergisitas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
			Penyediaan produk hukum daerah yang berkualitas dan tepat waktu
	<b>S22.2</b>	Memantapkan kordinasi dan kelembagaan Penyelenggaraan Otonomi khusus di Papua Barat	Meningkatkan kordinasi kebijakan penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat
			Mengembangkan instrumen pendukung efektivitas kebijakan Otsus
			Memfasilitasi pemberian bantuan-bantuan untuk pengembangan sumber daya manusia OAP dan lembaga lembaga adat serta keagamaan
	<b>S22.3</b>	Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi serta penataan kelembagaan dan proses bisnis organisasi Pemerintahan daerah secara lebih efisien dan efektif	Meningkatkan Kordinasi, Fasilitasi dan monitoring Evaluasi Pelaksanaan SPM pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua Barat
			Peningkatan kualitas organisasi dan ketatalaksanaan

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN
						2023
				Revitalisasi peran, fungsi, dan tugas Majelis Rakyat Papua dan Fasilitasi dan penguatan kelembagaan adat dalam memberikan rekomendasi pembangunan Papua yang berkualitas		
				Meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah		
				Penerapan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik		
				Memperkuat penataan daerah termasuk fasilitasi tapal batas antar wilayah kabupaten/kota di Papua Barat		
				Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum		
				Meningkatkan fasilitasi fungsi penganggaran, legislasi dan pengawasan DPRD		
<b>S23</b>	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	<b>S23.1</b>	Meningkatkan kualitas dan relevansi perencanaan pembangunan daerah sesuai konteks daerah Papua Barat	Memperkuat relevansi dan ketepatan waktu penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah		
				Menyusun dokumen perencanaan tematik daerah guna mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang		

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN
					2023
				Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pemantauan kebijakan pembangunan daerah	
				Sinkronisasi dokumen perencanaan daerah di berbagai bidang pembangunan	
				Pelaksanaan integrasi perencanaan dan penganggaran daerah dalam penerapan SIPD	
		<b>S23.2</b>	Mengembangkan mekanisme dan instrumen perencanaan Otonomi Khusus yang lebih baik dan menyasar OAP	Fasilitasi penguatan pendataan penduduk berbasis kampung	
				Meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat melalui mekanisme Musrenbang Umum dan Musrenbang OTSUS	
				Fasilitasi penyiapan perencanaan pembangunan daerah yg berbasis OAP	
<b>S24</b>	Meningkatnya profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	<b>S24.1</b>	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Harmonisasi Peraturan Perundangan Tentang Pengelolaan Keuangan daerah Provinsi Papua Barat	
				Penguatan mekanisme pengelolaan dana otonomi khusus dan sumber dana lainnya untuk pembangunan di wilayah Papua	

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN
						2023
				Memfasilitasi ketepatan waktu dan peningkatan kualitas APBD Papua Barat		
				Meningkatkan fasilitasi evaluasi APBD & pelaporan keuangan Kabupaten/Kota		
				Meningkatkan cakupan dan kualitas pengelolaan aset daerah		
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pencatatan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah		
				Meningkatkan kapasitas pendapatan daerah terutama yang berasal dari PAD		
		<b>S24.2</b>	Meningkatkan pengawasan dan sistem pengendalian internal pemerintah daerah	Meningkatkan pelaksanaan sistem pengawasan internal pemerintah daerah		
				Penguatan kapabilitas APIP dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan daerah		
				Penambahan auditor dalam memnuhi asistensi pengawasan pembangunan		
				Penguatan pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus Papua		



SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN
						2023
<b>S25</b>	Meningkatnya Profesionalitas aparatur dalam menyelenggaraan Pemerintahan	<b>S25.1</b>	Meningkatkan manajemen dan pelayanan ASN	Menegakkan kebijakan dan regulasi untuk peningkatan disiplin aparatur		
				Pengembangan kompetensi dan kinerja ASN berbasis pendidikan dan pelatihan		
				Mengembangkan kerjasama dan sinergisitas dengan lembaga lembaga yang potensial dalam upaya pengembangan kapasitas SDM aparatur		
				Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment		
				Pengembangan portal pendidikan dan pelatihan ASN terpadu oleh pemerintah daerah		
<b>S26</b>	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Pemerintah Daerah yang terimplementasi	<b>S26.1</b>	Mengembangkan riset dan penelitian untuk inovasi pelayanan pemerintah daerah	Mengembangkan kerjasama dan sinergisitas dengan lembaga-lembaga terkait untuk implementasi inovasi pelayanan daerah		
				Memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan yang berasal dari penelitian-penelitian terapan		
				Penerapan dan optimalisasi hasil kajian atau riset dalam implemntasi pembangunan daerah		

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN
						2023
<b>S27</b>	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil	<b>S27.1</b>	Mendorong percepatan legalitas administrasi kependudukan terutama Orang Asli Papua	Merumuskan definisi kependudukan khususnya berkaitan dengan Orang Asli Papua		
				Mengembangkan inovasi kebijakan untuk legalitas penduduk OAP		
				Penguatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan administrasi kependudukan kabupaten/kota		
		<b>S27.2</b>	Meningkatkan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat kampung	Penguatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan administrasi kependudukan kabupaten/kota		
				Pengembangan data base kependudukan Orang Asli Papua		
				Penyajian dan pemanfaatan profil kependudukan		
<b>S28</b>	Memperkuat distrik sebagai basis pembangunan wilayah	<b>S28.1</b>	Penguatan dan pemberdayaan pemerintah distrik sebagai pusat pelayanan, pusat inovasi, dan pusat informasi	Mengembangkan regulasi dan kelembagaan Distrik sebagai Basis Pembangunan Wilayah di Papua Barat		
				Mengembangkan model, standar dan pedoman distrik sebagai basis pembangunan wilayah		
				Meningkatkan sosialisasi dan Kordinasi Pengembangan Distrik sebagai Basis Pembangunan Wilayah		

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN
						2023
S29	Meningkatnya sistem informasi pemerintahan dan pembangunan berbasis kampung	S29.1	Meningkatkan kelembagaan dan perluasan sistem informasi pemerintahan dan pembangunan berbasis kampung	Memperkuat regulasi dan kelembagaan sistem informasi pemerintahan dan pembangunan berbasis kampung		
				Memperluas implementasi sistem informasi pemerintahan dan pembangunan berbasis kampung di seluruh Kabupaten/Kota Papua Barat		
				Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan kapasitas dan pemberdayaan kader kampung		

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN
			2023
<b>TUJUAN 6: Meningkatkan stabilitas wilayah dan daya tahan masyarakat Provinsi Papua Barat</b>			
<b>S30</b> Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana	<b>S30.1</b> Meningkatkan kesiagaan penanggulangan Multibencana daerah	Penguatan data, informasi, literasi dan kelembagaan dalam menghadapi multi bencana	
		Peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana penanggulangan bencana daerah	
		Penyiapan budaya sadar dan tanggap bencana	
		Pembangunan sistem peringatan dini (early warning system) kebencanaan	
		Penyediaan infrastruktur tanggap bencana	
		Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana	
<b>S31</b> Meningkat kententraman dan harmonisasi keragaman dalam masyarakat	<b>S31.1</b> Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat	Fasilitasi dan penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	
		Pemberdayaan dan pengawasan ormas	
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan	

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN
						2023
		<b>S31.2</b>	Memperkuat nilai-nilai toleransi dan moderasi antarumat beragama serta Penerapan Nilai-nilai Agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi		
				Peningkatan pemahaman politik, hak-hak, dan wawasan kebangsaan		
				Peningkatan kerukunan hidup masyarakat, kerukunan antar umat dan kerukunan antar golongan penduduk		
				Penguatan nilai-nilai toleransi dan moderasi antar umat beragama		
				Penguatan lembaga agama dan keagamaan, serta forum kerukunan umat beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong		
				Peningkatan komunikasi sosial dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok strategis		
				Peningkatan sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua Barat		

## **BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

### **4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.**

Dalam rangka melaksanakan masing-masing urusan pemerintahan sesuai dengan fungsi dan kewenangan dari masing-masing SKPD, maka perlu disusun program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. hal ini bertujuan agar kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat dapat berjalan maksimal. program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil, barang modal, teknologi dan dana, maupun kombinasinya ke semua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan azas dan manfaatnya.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam program RPJMD, RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tersaji dalam lampiran II Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022.

## 4.2 Plafon Anggaran Belanja

Sebagaimana defenisi yang dikembangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

**Tabel 4 Plafon Belanja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2023**

KODE	URAIAN	ESTIMASI (Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.074.702.987.336,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.072.561.249.721,00
5.1.02	Belanja Barang Jasa	1.561.380.118.574,00
5.1.03	Belanja Hibah	437.766.119.041,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.995.500.000,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.267.783.464.080,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	40.950.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	248.434.047.105,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	470.173.987.579,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.507.475.747.576,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	702.681.820,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	47.000.000,00
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>100.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	100.000.000.000,00
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>2.779.619.578.701,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	297.882.978.236,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	8.222.106.030.117,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>8.222.106.030.117,00</b>

## **BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Komponen pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh daerah, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

### **5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Estimasi pada komponen penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 630.999.999.938,00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022. Angka ini merupakan estimasi yang didasari proyeksi penyerapan anggaran oleh SKPD pada tahun anggaran 2022.

### **5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan daerah peruntukannya adalah Pembayaran penyertaan modal. pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Propinsi Papua Barat akan mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp.50.000.000.000,00 pada Bank Daerah, sehingga pengeluaran pembiayaan adalah Rp.50.000.000.000,00. Total pembiayaan netto adalah sebesar Rp. 580.999.999.938,00.

Rencana penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah sebagai berikut :



**Tabel 5 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023**

No	URAIAN	APBD 2023
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>630.999.999.938,00</b>
<b>6.1.01</b>	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	630.999.999.938,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	630.999.999.938,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>50.000.000.000,00</b>
<b>6.2.02</b>	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	50.000.000.000,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	580.999.999.938,00
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	0,00

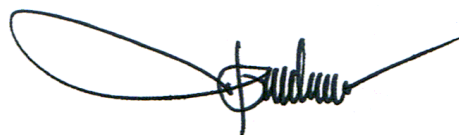
## BAB VI PENUTUP

Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan akibat adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua Barat serta dengan adanya penambahan atau pengurangan sumber pendapatan daerah setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara Gubernur Papua Barat dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat maka, terhadap program dan kegiatan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dengan cara dilakukan pada saat proses pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Manokwari, 21 November 2022

**Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT**



**Drs. PAULUS WATERPAUW, M.Si**

**PAGU SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA 2023  
TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>SKPD</b>	<b>PAGU</b>
1	DINAS PENDIDIKAN	585.769.306.430,00
2	DINAS KESEHATAN	325.649.387.182,00
3	BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	173.226.921.772,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.654.813.027.935,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	41.933.914.095,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16.929.626.875,00
7	DINAS SOSIAL	63.274.974.477,00
8	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	47.216.692.187,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	43.081.332.643,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	46.339.708.967,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	57.731.049.507,00
12	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	21.097.852.919,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	56.626.717.698,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	133.806.804.250,00
15	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	77.001.890.722,00
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	48.691.217.916,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	17.816.286.562,00
18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	36.108.597.077,00
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	45.158.696.590,00
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	20.588.932.590,00
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	117.151.230.355,00
22	BLUD KKP KEPULAUAN RAJA AMPAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	6.183.400.000,00
23	BLUD PENGELOLAAN KKP KAIMANA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	800.000.000,00
24	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	100.011.869.010,00
25	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	50.576.007.275,00
26	DINAS KEHUTANAN	165.781.894.655,00

27	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	71.635.779.558,00
28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	51.076.497.242,00
29	SEKRETARIAT DAERAH	373.014.833.537,00
30	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT	162.178.907.646,00
31	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	84.523.367.762,00
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	44.593.115.434,00
33	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.107.691.856.310,00
34	BADAN PENDAPATAN DAERAH	56.372.421.752,00
35	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	39.738.558.212,00
36	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	33.470.473.702,00
37	BLUD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	18.416.995.000,00
38	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	14.394.562.476,00
39	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	15.373.645.756,00
40	INSPEKTORAT	48.771.742.550,00
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	147.485.933.491,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.222.106.030.117,00</b>

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN**

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
<b>1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>2.861.597.158.766</b>
<b>1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>585.769.306.430</b>
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	585.769.306.430
<b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>131.112.468.165</b>
1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.932.285.487
1.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.057.840.000
1.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	236.532.570
1.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.003.545
1.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	260.446.842
1.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.277.462.530
1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92.333.553.352
1.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	89.846.312.008
1.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.040.241.344
1.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	147.000.000
1.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100.000.000
1.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.000.000
1.01.01.1.02.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100.000.000
1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	943.065.890
1.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	374.198.100
1.01.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	242.032.350
1.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	326.835.440
1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.212.899.483
1.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	803.489.970
1.01.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	250.000.000
1.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.652.066.403
1.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000
1.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	357.343.110
1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.252.003.313
1.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	299.986.000
1.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.296.831.662
1.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	597.432.000
1.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	296.000.000
1.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	189.600.000
1.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	471.362.256
1.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	187.920.000
1.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.018.424.000
1.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.077.834.200
1.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.816.613.195
1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.689.746.000
1.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.591.260.000
1.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.994.000
1.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.978.492.000
1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.458.332.840
1.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.487.840
1.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.907.120.000
1.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204.000.000
1.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	246.725.000
1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.290.581.800
1.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	996.000.000
1.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	295.170.000
1.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.999.411.800
<b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>441.464.053.855</b>
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	25.134.618.732
1.01.02.1.03.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
1.01.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	3.185.000.000
1.01.02.1.03.11 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	3.717.233.497
1.01.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	
1.01.02.1.03.45 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	
1.01.02.1.03.46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	2.005.168.930
1.01.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	
1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	12.312.505.150
1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	690.000.000
1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	
1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	1.505.180.000
1.01.02.1.03.53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	1.419.461.565
1.01.02.1.03.59 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	300.069.590
1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	2.999.920.000
1.01.02.4.04.07 Pemeliharaan Gedung Akademi Komunitas	
1.01.02.4.04.08 Pemeliharaan Ruang Belajar Akademi Komunitas	
1.01.02.4.04.09 Pemeliharaan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas	
1.01.02.4.04.20 Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas	
1.01.02.4.04.32 Penerbitan Izin Akademi Komunitas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
1.01.02.4.04.37 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas	
1.01.02.4.04.40 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	
1.01.02.4.04.41 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	
1.01.02.4.04.42 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	2.999.920.000

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1.01.02.4.05 Peningkatan Mutu Akademi Komunitas	81.460.132.423
1.01.02.4.05.01 Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma/ Akademi Komunitas	18.000.000.000
1.01.02.4.05.02 Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua	327.326.000
1.01.02.4.05.03 Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma	9.996.800.000
1.01.02.4.05.04 Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	53.136.006.423
1.01.02.4.06 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	105.237.979.520
1.01.02.4.06.07 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	21.727.200.000
1.01.02.4.06.08 Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP	83.510.779.520
1.01.02.4.07 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan	222.231.403.180
1.01.02.4.07.01 Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan	222.231.403.180
1.01.02.4.08 Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Tambahan	4.400.000.000
1.01.02.4.08.01 Pelaksanaan Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan	4.400.000.000
<b>1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>3.739.734.410</b>
1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	3.739.734.410
1.01.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	1.449.910.000
1.01.03.1.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	1.449.910.000
1.01.03.1.02.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	249.920.000
1.01.03.1.02.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	589.994.410
<b>1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>9.453.050.000</b>
1.01.04.4.02 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Papua Barat	9.453.050.000
1.01.04.4.02.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus	2.000.000.000
1.01.04.4.02.02 Pengajuan Formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pendidikan Akademi Komunitas	5.653.050.000
1.01.04.4.02.03 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1.800.000.000
<b>1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>498.876.308.954</b>
1.02.0.00.0.01.0000 DINAS KESEHATAN	498.876.308.954
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>125.019.819.477</b>
1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.108.522
1.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.354.058
1.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	44.536.423
1.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.218.041
1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	73.320.692.028
1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.910.539.505
1.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.369.297.093
1.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.855.430
1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	458.049.975
1.02.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	28.218.541
1.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	429.831.434
1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.705.510.062
1.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.143.743.500
1.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	422.518.833
1.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	28.218.541
1.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	111.029.188
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.522.987.161
1.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	221.601.000
1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.973.553.500
1.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	170.600.000
1.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.011.134.762
1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	278.707.000
1.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	219.000.000
1.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	31.443.795
1.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	670.486.000
1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.946.461.104
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.014.324.480
1.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.979.001.000
1.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	237.800.000
1.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3.000.000.000
1.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.797.523.480
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.971.622.249
1.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	69.350.000
1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.306.680.400
1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	595.591.849
1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.917.525.000
1.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	682.800.000
1.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	588.950.000
1.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	
1.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.132.590.000
1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.673.185.000
1.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.840.000.000
<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>347.287.268.268</b>
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	272.893.333.987
1.02.02.1.01.01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
1.02.02.1.01.02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	30.234.933.898
1.02.02.1.01.03 Pengembangan Rumah Sakit	103.337.226.200
1.02.02.1.01.04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
1.02.02.1.01.06 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	3.877.354.600

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1.02.02.1.01.07 Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	282.891.165
1.02.02.1.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.571.450.387
1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	84.290.691.350
1.02.02.1.01.13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	1.068.012.000
1.02.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	21.689.863.065
1.02.02.1.01.17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
1.02.02.1.01.20 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	431.236.800
1.02.02.1.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.766.079.116
1.02.02.1.01.22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	19.343.595.406
1.02.02.1.01.23 Distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ke Kabupaten/Kota	
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	61.428.616.710
1.02.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3.010.021.600
1.02.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.092.838.250
1.02.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.537.333.000
1.02.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	836.248.319
1.02.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	291.648.048
1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.196.106.145
1.02.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	180.000.000
1.02.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	72.168.000
1.02.02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
1.02.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	200.000.000
1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	792.056.108
1.02.02.1.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	100.000.000
1.02.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	250.000.000
1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15.428.397.600
1.02.02.1.02.17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.146.434.640
1.02.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	
1.02.02.1.02.19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	8.683.500.000
1.02.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	
1.02.02.1.02.21 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	
1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
1.02.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	302.140.665
1.02.02.1.02.24 Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	1.543.520.000
1.02.02.1.02.25 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	87.320.000
1.02.02.1.02.26 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	15.000.000.000
1.02.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.678.884.335
1.02.02.1.02.30 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	2.195.041.744
1.02.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	
1.02.02.1.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	2.195.041.744
1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	8.618.275.827
1.02.02.1.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	4.383.520.322
1.02.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	4.234.755.505
1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.152.000.000
1.02.02.4.02.35 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	852.000.000
1.02.02.4.02.37 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	520.000.000
1.02.02.4.02.38 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	780.000.000
1.02.02.4.02.44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	
<b>1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>22.768.626.000</b>
1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
1.02.03.1.01.01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
1.02.03.1.01.02 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	10.098.878.000
1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.828.348.000
1.02.03.1.02.02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	270.530.000
1.02.03.4.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	10.150.000.000
1.02.03.4.02.05 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	10.150.000.000
1.02.03.4.03 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	2.519.748.000
1.02.03.4.03.01 Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasidengan Program JKN	2.519.748.000
<b>1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>888.247.069</b>
1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	682.639.526
1.02.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	346.532.413
1.02.04.1.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	336.107.113
1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	205.607.543
1.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	205.607.543
1.02.04.1.02.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	
<b>1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>2.912.348.140</b>
1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	698.048.760
1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	698.048.760
1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	
1.02.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
1.02.05.1.02.02 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
1.02.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	2.214.299.380
1.02.05.1.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	2.214.299.380

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
<b>1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>1.632.358.910.015</b>
1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.632.358.910.015
<b>1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>40.540.295.020</b>
1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.338.613.782
1.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	426.962.947
1.03.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	300.000.400
1.03.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	497.573.027
1.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.077.408
1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.431.749.829
1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.025.296.829
1.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	790.360.000
1.03.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	616.093.000
1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	382.520.000
1.03.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	382.520.000
1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.193.036.383
1.03.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	155.500.383
1.03.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	355.470.000
1.03.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	326.786.000
1.03.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	355.280.000
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.208.476.745
1.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	502.652.745
1.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	446.000.000
1.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	540.000.000
1.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	150.500.000
1.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.569.324.000
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.275.052.751
1.03.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	904.000.000
1.03.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	288.036.290
1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.016.461
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.438.779.470
1.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.488.000
1.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	540.007.325
1.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	888.284.145
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.272.066.060
1.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	339.992.500
1.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	349.470.000
1.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	582.603.560
<b>1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>123.145.309.966</b>
1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	102.254.686.966
1.03.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	
1.03.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	
1.03.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	
1.03.02.1.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1.000.000.000
1.03.02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	29.324.356.966
1.03.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai	71.930.330.000
1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.890.623.000
1.03.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	
1.03.02.1.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
1.03.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	20.890.623.000
1.03.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
1.03.02.1.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi	
<b>1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>50.029.818.000</b>
1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	50.029.818.000
1.03.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	4.050.000.000
1.03.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	45.979.818.000
<b>1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>3.500.000.000</b>
1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	3.500.000.000
1.03.04.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	3.500.000.000
<b>1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>35.079.000.000</b>
1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	35.079.000.000
1.03.05.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	4.050.000.000
1.03.05.1.01.02 Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	23.969.000.000
1.03.05.1.01.03 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	7.060.000.000
<b>1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>1.070.000.000</b>
1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.070.000.000
1.03.06.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
1.03.06.1.01.04 Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	1.070.000.000
<b>1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>58.519.454.000</b>
1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	58.519.454.000
1.03.07.1.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	58.519.454.000
1.03.07.1.01.03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	
1.03.07.4.02 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP	
1.03.07.4.02.01 Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
<b>1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>50.000.000.000</b>
1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	50.000.000.000
1.03.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	50.000.000.000
1.03.08.1.01.02 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
<b>1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>12.000.000.000</b>
1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000.000
1.03.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	12.000.000.000
<b>1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>1.231.033.578.000</b>
1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.231.033.578.000
1.03.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	32.098.844.000
1.03.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	2.000.000.000
1.03.10.1.01.05 Pembangunan Jalan	602.000.000.000
1.03.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan	426.069.044.250
1.03.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan	50.000.000.000
1.03.10.1.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	37.439.999.000
1.03.10.1.01.12 Pembangunan Jembatan	78.850.000.000
1.03.10.1.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	213.903.200
1.03.10.1.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2.361.787.550
<b>1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>11.731.786.283</b>
1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	8.089.840.896
1.03.11.1.01.01 Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	235.998.850
1.03.11.1.01.02 Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan	507.999.220
1.03.11.1.01.03 Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	233.721.545
1.03.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.654.081.384
1.03.11.1.01.05 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	130.999.825
1.03.11.1.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	3.131.040.000
1.03.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	2.100.000.000
1.03.11.1.01.08 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	96.000.072
1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	2.641.995.487
1.03.11.1.02.01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	295.000.035
1.03.11.1.02.02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1.281.992.427
1.03.11.1.02.03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	115.000.180
1.03.11.1.02.04 Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	475.004.928
1.03.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	474.997.917
1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	999.949.900
1.03.11.1.03.02 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	999.949.900
<b>1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>15.709.668.746</b>
1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	4.550.000.114
1.03.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	4.050.000.000
1.03.12.1.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	500.000.114
1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	9.324.667.892
1.03.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RTRR Kabupaten/Kota	8.824.665.746
1.03.12.1.02.04 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	500.002.146
1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	835.000.380
1.03.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	
1.03.12.1.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	835.000.380
1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.000.000.360
1.03.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.000.000.360
<b>1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>22.454.117.920</b>
1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	22.454.117.920
<b>1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>5.979.208.560</b>
1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
1.04.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	5.979.208.560
1.04.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	5.979.208.560
<b>1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>2.552.546.880</b>
1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.552.546.880
1.04.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
1.04.03.1.02.03 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.552.546.880
1.04.03.1.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
<b>1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>13.922.362.480</b>
1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	13.922.362.480
1.04.05.1.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	
1.04.05.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	13.922.362.480
<b>1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>58.863.540.970</b>
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	41.933.914.095
<b>1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>35.325.724.095</b>
1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	304.999.285
1.05.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	98.593.020
1.05.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	70.174.765
1.05.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	136.231.500
1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.364.378.064
1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.114.378.064

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1.05.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250.000.000
1.05.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	796.650.000
1.05.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	490.000.000
1.05.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
1.05.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	306.650.000
1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	613.090.000
1.05.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
1.05.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
1.05.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	250.000.000
1.05.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	363.090.000
1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	720.660.746
1.05.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
1.05.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
1.05.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	82.783.515
1.05.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	
1.05.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	328.562.231
1.05.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309.315.000
1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.450.000.000
1.05.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
1.05.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
1.05.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.450.000.000
1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.865.946.000
1.05.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
1.05.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.690.000
1.05.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
1.05.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.760.256.000
1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.000.000
1.05.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.000.000
<b>1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1.600.000.000</b>
1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.150.000.000
1.05.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	850.000.000
1.05.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
1.05.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	300.000.000
1.05.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
1.05.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
1.05.02.1.01.06 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	
1.05.02.1.01.08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100.000.000
1.05.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	100.000.000
1.05.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	350.000.000
1.05.02.1.03.02 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	350.000.000
<b>1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>5.008.190.000</b>
1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	5.008.190.000
1.05.04.1.01.05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	4.579.860.000
1.05.04.1.01.09 Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	428.330.000
1.05.04.1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
1.05.04.1.02.01 Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
<b>1.05.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>16.929.626.875</b>
<b>1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>11.705.991.846</b>
1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.967.258
1.05.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.852.178
1.05.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	62.790.280
1.05.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.324.800
1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.582.427.228
1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.929.627.228
1.05.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	652.800.000
1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	230.972.000
1.05.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	150.052.000
1.05.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80.920.000
1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	824.415.675
1.05.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	164.009.675
1.05.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.010.000
1.05.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.320.000
1.05.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	599.076.000
1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.05.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	573.459.685
1.05.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.800.000
1.05.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.999.981
1.05.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	437.659.704
1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.750.000
1.05.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	311.750.000

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1.05.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000
<b>1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>5.223.635.029</b>
1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.913.039.701
1.05.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	487.493.020
1.05.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.535.621.062
1.05.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	202.434.000
1.05.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	487.491.959
1.05.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	199.999.660
1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	287.381.050
1.05.03.1.03.02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	287.381.050
1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	2.023.214.278
1.05.03.1.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.026.524.677
1.05.03.1.04.07 Penanganan Pasca Bencana Provinsi	996.689.601
<b>1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>63.274.974.477</b>
1.06.0.00.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL	63.274.974.477
<b>1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>29.100.553.932</b>
1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	396.181.768
1.06.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	135.505.150
1.06.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	101.141.216
1.06.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	45.197.788
1.06.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	114.337.614
1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.310.347.222
1.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.772.907.641
1.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	437.440.000
1.06.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.999.898
1.06.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	49.999.683
1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.582.352.644
1.06.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	590.168.000
1.06.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
1.06.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	141.752.647
1.06.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	684.787.000
1.06.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	165.644.997
1.06.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.141.023.666
1.06.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
1.06.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	228.855.150
1.06.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149.996.476
1.06.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
1.06.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
1.06.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.762.172.040
1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	811.336.998
1.06.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	668.844.000
1.06.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1.06.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	142.492.998
1.06.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
1.06.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
1.06.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.859.311.634
1.06.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.020.000
1.06.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.390.000
1.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.657.901.634
1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.06.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
1.06.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
1.06.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1.06.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
1.06.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
1.06.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
1.06.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
<b>1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>5.000.000.000</b>
1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
1.06.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	5.000.000.000
1.06.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	301.200.000
1.06.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	
1.06.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	4.698.800.000
1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	
<b>1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>5.000.031.335</b>
1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	3.025.110.615
1.06.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan	1.594.313.100
1.06.04.1.01.02 Penyediaan Sandang	
1.06.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
1.06.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu	1.234.347.810
1.06.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
1.06.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	196.449.705
1.06.04.1.01.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
1.06.04.1.01.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	
1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.267.995.720
1.06.04.1.02.01 Pengasuhan	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1.06.04.1.02.02 Penyediaan Makanan	1.267.995.720
1.06.04.1.02.03 Penyediaan Sandang	
1.06.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
1.06.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
1.06.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
1.06.04.1.02.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
1.06.04.1.02.08 Fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	
1.06.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
1.06.04.1.02.12 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	
1.06.04.1.02.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	706.925.000
1.06.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan	706.925.000
1.06.04.1.03.02 Penyediaan Sandang	
1.06.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
1.06.04.1.03.04 Penyediaan Alat Bantu	
1.06.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	
1.06.04.1.03.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	
1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
1.06.04.1.05.02 Penyediaan Sandang	
1.06.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
1.06.04.1.05.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	
<b>1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>19.133.373.780</b>
1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	19.133.373.780
1.06.05.1.02.01 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.824.780.950
1.06.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.156.488.800
1.06.05.1.02.03 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	13.152.104.030
<b>1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>5.041.015.430</b>
1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	5.041.015.430
1.06.06.1.01.01 Penyediaan Permakanan	362.610.100
1.06.06.1.01.02 Penyediaan Sandang	3.427.961.890
1.06.06.1.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
1.06.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
1.06.06.1.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial	1.250.443.440
<b>1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	
1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
1.06.07.1.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
1.06.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
1.06.07.1.01.03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>632.194.098.503</b>
<b>2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>43.164.126.187</b>
2.07.3.32.0.00.02.0000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	43.164.126.187
<b>2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>26.097.379.718</b>
2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	275.000.000
2.07.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125.000.000
2.07.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	50.000.000
2.07.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.000.000
2.07.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000
2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.007.917.318
2.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.148.236.835
2.07.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.759.680.483
2.07.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.000.000
2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.153.706.000
2.07.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	400.000.000
2.07.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250.000.000
2.07.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	203.706.000
2.07.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000
2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.406.778.400
2.07.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.012.763.350
2.07.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.000.000
2.07.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	24.000.000
2.07.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000
2.07.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	250.000.000
2.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.670.015.050
2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000
2.07.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000
2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.000.000
2.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000
2.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000
2.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.000.000
2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	675.978.000
2.07.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	475.978.000
2.07.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000
<b>2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>8.200.000.000</b>
2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	8.200.000.000
2.07.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.200.000.000
2.07.03.1.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	7.000.000.000
<b>2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>3.958.746.469</b>

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.958.746.469
2.07.04.1.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja	2.958.746.469
2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1.000.000.000
2.07.04.1.03.01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1.000.000.000
<b>2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>2.408.000.000</b>
2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	350.000.000
2.07.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	350.000.000
2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	258.000.000
2.07.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	258.000.000
2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)	1.800.000.000
2.07.05.1.03.01 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	1.800.000.000
<b>2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>	<b>2.500.000.000</b>
2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.500.000.000
2.07.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	2.000.000.000
2.07.06.1.01.02 Penegekan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	200.000.000
2.07.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	300.000.000
<b>2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>43.081.332.643</b>
2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	43.081.332.643
<b>2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>14.231.148.247</b>
2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.780.000
2.08.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	30.790.000
2.08.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	34.094.000
2.08.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.976.000
2.08.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.920.000
2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.836.274.804
2.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.337.553.927
2.08.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.458.820.877
2.08.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	39.900.000
2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	742.922.660
2.08.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	146.894.660
2.08.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	364.440.000
2.08.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	231.588.000
2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.497.583.600
2.08.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	204.625.600
2.08.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.500.000
2.08.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	26.400.000
2.08.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	208.800.000
2.08.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.030.258.000
2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	178.279.664
2.08.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	178.279.664
2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	661.269.519
2.08.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.040.000
2.08.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	512.229.519
2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.038.000
2.08.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.038.000
<b>2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>4.042.807.410</b>
2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.488.635.300
2.08.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	805.215.820
2.08.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	1.683.419.480
2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	656.712.966
2.08.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	656.712.966
2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	897.459.144
2.08.02.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	897.459.144
<b>2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>5.730.322.155</b>
2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	831.975.854
2.08.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	831.975.854
2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.036.710.000
2.08.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	2.036.710.000
2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.861.636.301
2.08.03.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	520.074.063
2.08.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	702.972.684
2.08.03.1.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	1.003.902.000
2.08.03.1.03.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	634.687.554
<b>2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>15.397.797.598</b>
2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	15.076.523.066
2.08.04.1.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	523.147.998
2.08.04.1.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	14.553.375.068

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	321.274.532
2.08.04.1.02.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	321.274.532
<b>2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>918.726.490</b>
2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	918.726.490
2.08.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	539.999.520
2.08.05.1.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	378.726.970
<b>2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>1.591.552.962</b>
2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	1.391.552.962
2.08.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	941.552.972
2.08.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	449.999.990
2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	200.000.000
2.08.06.1.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	200.000.000
2.08.06.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
<b>2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>1.168.977.781</b>
2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	338.062.629
2.08.07.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	338.062.629
2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	514.415.620
2.08.07.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	514.415.620
2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	316.499.532
2.08.07.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	316.499.532
<b>2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>46.339.708.967</b>
2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	46.339.708.967
<b>2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>18.846.242.150</b>
2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	379.199.385
2.09.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000
2.09.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	179.199.385
2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.931.657.588
2.09.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.006.657.588
2.09.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	850.000.000
2.09.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000
2.09.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000
2.09.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.000.000
2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.186.364
2.09.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150.182.238
2.09.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.004.126
2.09.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000
2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.701.428.300
2.09.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000
2.09.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000
2.09.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000
2.09.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.551.428.300
2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.047.260.882
2.09.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.047.260.882
2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.276.409.065
2.09.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.025.690
2.09.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000
2.09.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	922.383.375
2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.110.100.566
2.09.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000
2.09.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	604.145.900
2.09.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.954.666
<b>2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>13.160.415.488</b>
2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.010.186.738
2.09.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	550.000.000
2.09.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	499.999.997
2.09.03.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	960.186.741
2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	4.200.228.750
2.09.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	2.500.000.000
2.09.03.1.02.04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1.700.228.750
2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	6.950.000.000
2.09.03.1.04.01 Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3.714.583.000
2.09.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	2.935.417.000
2.09.03.1.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	300.000.000
<b>2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>4.333.051.379</b>
2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	600.000.000
2.09.04.1.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	600.000.000
2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	3.733.051.379
2.09.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	3.733.051.379
<b>2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>9.999.999.950</b>
2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.999.999.950
2.09.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	4.999.999.950

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
2.09.05.1.01.02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000
2.09.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000.000
2.09.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	500.000.000
<b>2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>40.439.055.255</b>
2.10.2.11.0.00.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	40.439.055.255
<b>2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	<b>999.955.255</b>
2.10.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	999.955.255
2.10.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	999.955.255
<b>2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>39.439.100.000</b>
2.10.05.1.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	39.439.100.000
2.10.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
2.10.05.1.01.02 Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	39.439.100.000
<b>2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>	
2.10.07.1.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
2.10.07.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
2.10.07.1.01.02 Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	
<b>2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>17.291.994.252</b>
2.10.2.11.0.00.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	17.291.994.252
<b>2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>14.578.128.647</b>
2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.642.505
2.11.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2.11.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
2.11.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.642.505
2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.293.948.303
2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.768.948.303
2.11.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	525.000.000
2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.000.000
2.11.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.000.000
2.11.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
2.11.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
2.11.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	720.814.937
2.11.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	222.012.416
2.11.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.404.883
2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.000.000
2.11.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	99.200.000
2.11.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.212.000
2.11.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	49.985.638
2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.271.844.000
2.11.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	947.001.000
2.11.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	324.843.000
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	791.776.402
2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000
2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.599.000
2.11.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.998.000
2.11.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	504.179.402
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	426.102.500
2.11.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000
2.11.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.640.000
2.11.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.312.000
2.11.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	301.150.500
<b>2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1.192.633.290</b>
2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.192.633.290
2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	302.402.352
2.11.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	290.231.066
2.11.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	599.999.872
2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
2.11.03.1.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
<b>2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	
2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
2.11.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	
<b>2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>749.999.347</b>
2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	749.999.347
2.11.06.1.01.02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pegawai Lingkungan Hidup	449.999.610
2.11.06.1.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	299.999.737
<b>2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	
2.11.07.1.01 Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
2.11.07.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
<b>2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>169.751.800</b>
2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	169.751.800
2.11.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	169.751.800
<b>2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>119.399.537</b>
2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	119.399.537
2.11.09.1.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	119.399.537
<b>2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>249.999.691</b>
2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Provinsi	249.999.691
2.11.10.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	249.999.691
<b>2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>232.081.940</b>
2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	232.081.940
2.11.11.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	115.560.791
2.11.11.1.01.06 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	116.521.149
<b>2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>21.097.852.919</b>
2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BRENCANA	21.097.852.919
<b>2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>15.468.558.940</b>
2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000
2.12.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000
2.12.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	30.000.000
2.12.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000
2.12.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000
2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.317.428.630
2.12.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.021.748.630
2.12.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	235.680.000
2.12.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000
2.12.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.000.000
2.12.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000
2.12.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.000.000
2.12.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000
2.12.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000
2.12.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	269.810.000
2.12.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	61.305.000
2.12.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000
2.12.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	158.505.000
2.12.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000
2.12.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000
2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.138.892.231
2.12.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.950.000
2.12.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	593.308.000
2.12.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000
2.12.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.154.231
2.12.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	175.480.000
2.12.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000
2.12.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.100.000.000
2.12.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000
2.12.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	668.844.000
2.12.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	668.844.000
2.12.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.359.621.079
2.12.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	369.999.170
2.12.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	989.621.909
2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	573.963.000
2.12.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000
2.12.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	319.989.500
2.12.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.970.000
2.12.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	203.003.500
<b>2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>1.859.999.528</b>
2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	1.709.999.528
2.12.02.1.02.01 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	1.350.000.000
2.12.02.1.02.04 Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	359.999.528
2.12.02.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	150.000.000
2.12.02.1.03.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	150.000.000
<b>2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>592.955.505</b>
2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	592.955.505
2.12.03.1.02.01 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	399.551.000
2.12.03.1.02.02 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	193.404.505
2.12.03.1.02.04 Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan	
2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
2.12.03.1.03.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	
<b>2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>1.976.338.946</b>
2.12.04.1.01 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
2.12.04.1.01.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
2.12.04.1.01.02 Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	1.778.108.622
2.12.04.1.02.01 Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.211.625.511
2.12.04.1.02.04 Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	200.000.000
2.12.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
2.12.04.1.02.06 Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi	89.983.979
2.12.04.1.02.07 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	276.499.132
2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	198.230.324
2.12.04.1.03.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	119.000.968
2.12.04.1.03.02 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	79.229.356
<b>2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>1.200.000.000</b>
2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan	1.200.000.000
2.12.05.1.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	650.000.000
2.12.05.1.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	550.000.000
<b>2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>56.626.717.698</b>
2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	56.626.717.698
<b>2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>17.563.206.812</b>
2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.461.163.253
2.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.461.163.253
2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.962.848.000
2.13.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.000.000.000
2.13.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	742.842.000
2.13.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	220.006.000
2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.235.781.230
2.13.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	218.879.258
2.13.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	297.251.000
2.13.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.719.650.972
2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000
2.13.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000
2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	702.220.000
2.13.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	363.420.000
2.13.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	338.800.000
2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.101.194.329
2.13.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	555.100.000
2.13.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.546.094.329
<b>2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>3.181.199.560</b>
2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	3.181.199.560
2.13.02.1.01.03 Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	2.300.000.000
2.13.02.1.01.04 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	881.199.560
<b>2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>1.130.074.258</b>
2.13.03.1.01 Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1.130.074.258
2.13.03.1.01.03 Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	1.130.074.258
<b>2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>800.000.000</b>
2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	800.000.000
2.13.04.1.01.15 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	500.000.000
2.13.04.1.01.16 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	300.000.000
<b>2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>11.910.000.000</b>
2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11.910.000.000
2.13.05.1.01.04 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
2.13.05.1.01.05 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3.400.000.000
2.13.05.1.01.06 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.550.000.000
2.13.05.1.01.09 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5.960.000.000
<b>2.13.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT</b>	<b>22.042.237.068</b>
2.13.07.4.01 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung	
2.13.07.4.01.01 Pembangunan Sanggar PKK di Kampung	
2.13.07.4.01.02 Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di kampung	
2.13.07.4.02 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kampung	2.394.192.157
2.13.07.4.02.01 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kampung	794.192.157
2.13.07.4.02.02 Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	1.600.000.000
2.13.07.4.03 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung	4.300.000.000
2.13.07.4.03.01 Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPM dan Penggunaan Dana Kampung	650.000.000
2.13.07.4.03.02 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Pemerintah Kampung (PTPK)	500.000.000
2.13.07.4.03.03 Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi	2.000.000.000
2.13.07.4.03.04 Pelatihan dan Penyusunan Penataan dan Kewenangan Kampung Adat	700.000.000
2.13.07.4.03.05 Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Kampung	450.000.000
2.13.07.4.04 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung	7.471.966.622
2.13.07.4.04.01 Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Usaha (Mama-Mama dan Pemuda)	
2.13.07.4.04.02 Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengusaha OAP	916.020.110
2.13.07.4.04.03 Pemberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP)	
2.13.07.4.04.04 Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi	2.000.000.000
2.13.07.4.04.05 Penyedia Bantuan Seni Budaya Orang Asli Papua	750.000.000
2.13.07.4.04.06 Penyedia Solar Sel bagi Masyarakat Kampung	1.486.787.766
2.13.07.4.04.07 Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung	1.569.158.746
2.13.07.4.04.08 Pembangunan dan Bantuan Perlengkapan Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung	750.000.000
2.13.07.4.05 Peningkatan Perencanaan Pelayanan SKPD	5.426.078.289
2.13.07.4.05.01 Rapat Koordinasi Teknis dan Gelar Potensi Daerah	1.014.756.264
2.13.07.4.05.02 Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Kampung Berbasis Teknologi	4.411.322.025

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
2.13.07.4.06 Pengembangan Ekonomi Kampung	
2.13.07.4.06.01 Bantuan Mesin Babat/Pemotong Rumput bagi Masyarakat di Kampung	2.450.000.000
2.13.07.4.06.02 Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata	2.450.000.000
2.13.07.4.06.03 Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung	
2.13.07.4.06.04 Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tela	
<b>2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	
2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
<b>2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
2.14.02.1.01.03 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	
2.14.02.1.01.04 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	
2.14.02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	
2.14.02.1.01.10 Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	
2.14.02.1.01.11 Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	
<b>2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	
2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
2.14.03.1.01.03 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
2.14.03.1.01.04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	
2.14.03.1.01.07 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	
2.14.03.1.01.08 Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	
2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
2.14.03.1.02.03 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	
<b>2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	
2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
2.14.04.1.01.03 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
2.14.04.1.01.04 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	
2.14.04.1.01.14 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	
2.14.04.1.01.15 Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	
<b>2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>133.806.804.250</b>
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	133.806.804.250
<b>2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>19.875.041.722</b>
2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.623.573.600
2.15.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	780.940.000
2.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.842.633.600
2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.552.440.261
2.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.175.041.723
2.15.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	377.398.538
2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000
2.15.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
2.15.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
2.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
2.15.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000
2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.672.261
2.15.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	194.267.900
2.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
2.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
2.15.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	77.404.361
2.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	850.000.000
2.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
2.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	850.000.000
2.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.427.355.600
2.15.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	489.800.000
2.15.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.15.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.838.486.400
2.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.069.200
<b>2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>41.719.999.999</b>
2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	18.592.999.999
2.15.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	18.592.999.999
2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	23.127.000.000
2.15.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal	23.127.000.000
<b>2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>66.067.174.401</b>
2.15.03.1.09 Pembangunan, Pemberitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	66.067.174.401
2.15.03.1.09.02 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	66.067.174.401
<b>2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN</b>	<b>5.386.948.128</b>
2.15.04.4.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi	5.386.948.128
2.15.04.4.01.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara	5.386.948.128
<b>2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>	<b>757.640.000</b>
2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	757.640.000
2.15.05.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	757.640.000

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
<b>2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>72.444.717.449</b>
2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	72.444.717.449
<b>2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>14.592.481.352</b>
2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177.685.080
2.16.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99.036.000
2.16.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	45.164.080
2.16.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.485.000
2.16.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.725.777.413
2.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.001.895.404
2.16.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.693.887.509
2.16.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.994.500
2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	98.400.000
2.16.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	98.400.000
2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000
2.16.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
2.16.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	300.000.000
2.16.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.827.782.639
2.16.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	210.223.500
2.16.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000
2.16.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000
2.16.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	312.504.000
2.16.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.005.055.139
2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	604.825.220
2.16.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.100.000
2.16.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	394.110.000
2.16.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.615.220
2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	858.011.000
2.16.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	299.915.000
2.16.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
2.16.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	558.096.000
2.16.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.16.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
<b>2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>7.567.214.622</b>
2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	7.567.214.622
2.16.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	300.000.000
2.16.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	
2.16.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik	100.000.000
2.16.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	
2.16.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	166.112.778
2.16.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	
2.16.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	
2.16.02.1.01.13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	7.001.101.844
<b>2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>50.285.021.475</b>
2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	50.285.021.475
2.16.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.312.350.000
2.16.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	
2.16.03.1.02.08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	36.100.000.000
2.16.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	9.778.630.240
2.16.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2.880.000.000
2.16.03.1.02.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	214.041.235
<b>2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>48.691.217.916</b>
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	48.691.217.916
<b>2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>18.837.881.674</b>
2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	395.562.656
2.17.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	280.562.656
2.17.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	20.000.000
2.17.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000
2.17.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.000.000
2.17.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	25.000.000
2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.174.921.450
2.17.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.185.920.674
2.17.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	989.000.776
2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	582.646.662
2.17.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	92.936.662
2.17.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	89.710.000
2.17.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000
2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.568.195.262
2.17.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.035.242
2.17.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000
2.17.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36.000.000
2.17.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	70.000.000
2.17.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.279.160.020
2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.474.271.444
2.17.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.274.247.444
2.17.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.024.000
2.17.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.003.500

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
2.17.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.600.000
2.17.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.242.000
2.17.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.161.500
2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.382.280.700
2.17.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	330.050.800
2.17.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	357.240.000
2.17.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000
2.17.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	518.079.900
2.17.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76.910.000
2.17.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
<b>2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>400.000.000</b>
2.17.02.1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	250.000.000
2.17.02.1.01.01 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	250.000.000
2.17.02.1.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	150.000.000
2.17.02.1.02.01 Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	150.000.000
<b>2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>750.000.000</b>
2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	750.000.000
2.17.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	350.000.000
2.17.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	400.000.000
<b>2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>900.000.000</b>
2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	900.000.000
2.17.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	300.000.000
2.17.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	600.000.000
<b>2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>1.676.063.000</b>
2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	811.432.582
2.17.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	811.432.582
2.17.05.1.02 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	864.630.418
2.17.05.1.02.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	864.630.418
<b>2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>2.049.999.647</b>
2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.049.999.647
2.17.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	399.494.000
2.17.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1.650.505.647
<b>2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>17.928.458.000</b>
2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	17.928.458.000
2.17.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	17.928.458.000
<b>2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>6.148.815.595</b>
2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	6.148.815.595
2.17.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	6.148.815.595
<b>2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>17.816.286.562</b>
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	17.816.286.562
<b>2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>13.287.609.637</b>
2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	344.933.866
2.18.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89.999.829
2.18.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	39.999.478
2.18.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	34.999.516
2.18.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	119.961.628
2.18.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.973.415
2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.290.454.614
2.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.787.280.670
2.18.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.198.177.075
2.18.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.999.950
2.18.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	124.999.656
2.18.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	19.998.065
2.18.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	139.999.198
2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.000.214
2.18.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.001.254
2.18.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.998.960
2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	399.248.152
2.18.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
2.18.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	49.999.060
2.18.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	129.808.000
2.18.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	69.876.000
2.18.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
2.18.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	49.997.092
2.18.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	99.568.000
2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	867.278.178

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
2.18.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.994.058
2.18.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.997.200
2.18.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	82.512.920
2.18.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	124.300.000
2.18.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	509.474.000
2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	178.821.193
2.18.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	128.825.830
2.18.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.995.363
2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.216.420
2.18.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
2.18.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.225.000
2.18.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.991.420
2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	954.657.000
2.18.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249.352.000
2.18.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.770.000
2.18.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	499.535.000
2.18.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
<b>2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.037.360.167</b>
2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	348.974.241
2.18.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	348.974.241
2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	688.385.926
2.18.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	344.067.548
2.18.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	344.318.378
<b>2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.137.470.297</b>
2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.137.470.297
2.18.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	966.270.297
2.18.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	171.200.000
<b>2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.287.499.643</b>
2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.287.499.643
2.18.04.1.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	300.288.912
2.18.04.1.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	697.225.160
2.18.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	99.997.000
2.18.04.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	189.988.571
<b>2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.066.346.818</b>
2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.066.346.818
2.18.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	189.170.920
2.18.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	498.143.898
2.18.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	379.032.000
<b>2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>36.108.597.077</b>
2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	36.108.597.077
<b>2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>24.478.597.077</b>
2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	363.000.000
2.19.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.000.000
2.19.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	65.000.000
2.19.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	65.000.000
2.19.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59.500.000
2.19.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.500.000
2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.618.613.098
2.19.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.205.116.098
2.19.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.413.497.000
2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	395.500.000
2.19.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	75.500.000
2.19.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	320.000.000
2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.706.694.979
2.19.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	786.111.000
2.19.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000
2.19.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	300.000.000
2.19.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	660.000.000
2.19.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	480.583.979
2.19.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.280.000.000
2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000
2.19.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000
2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	778.000.000
2.19.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	378.000.000
2.19.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	400.000.000
2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.416.789.000
2.19.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	336.000.000
2.19.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.900.000
2.19.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	508.889.000
2.19.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000
2.19.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000
2.19.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000.000
<b>2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>2.650.000.000</b>
2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1.650.000.000
2.19.02.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	700.000.000
2.19.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	350.000.000
2.19.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	100.000.000

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
2.19.02.1.01.09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	500.000.000
2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	1.000.000.000
2.19.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	1.000.000.000
<b>2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>8.480.000.000</b>
2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	5.600.000.000
2.19.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	4.100.000.000
2.19.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	1.500.000.000
2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	2.880.000.000
2.19.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	2.380.000.000
2.19.03.1.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	500.000.000
<b>2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>500.000.000</b>
2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.000.000
2.19.04.1.01.04 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	500.000.000
<b>2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>116.683.183</b>
2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	116.683.183
<b>2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>116.683.183</b>
2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	116.683.183
2.20.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	
2.20.02.1.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	116.683.183
<b>2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>4.440.490.090</b>
2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	4.440.490.090
<b>2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>4.440.490.090</b>
2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	4.440.490.090
2.21.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	300.000.000
2.21.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	300.774.000
2.21.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	3.839.716.090
<b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>30.139.581.465</b>
2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	30.139.581.465
<b>2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>21.462.172.381</b>
2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.116.000
2.22.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000
2.22.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	50.000.000
2.22.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000
2.22.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.116.000
2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.933.473.381
2.22.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.446.730.381
2.22.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	466.560.000
2.22.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.183.000
2.22.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	174.760.000
2.22.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	174.760.000
2.22.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.020.788.748
2.22.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	337.130.748
2.22.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	497.638.000
2.22.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	186.020.000
2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.885.566.604
2.22.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.586.666
2.22.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	263.545.750
2.22.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.500.000
2.22.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000
2.22.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.050.000
2.22.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.425.884.188
2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.305.466.033
2.22.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	253.329.996
2.22.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	402.136.037
2.22.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.650.000.000
2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.012.160.264
2.22.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.115.000
2.22.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	238.175.000
2.22.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	768.870.264
2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	869.841.351
2.22.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000
2.22.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.690.000
2.22.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	289.070.367
2.22.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.049.672
2.22.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.031.312
<b>2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>1.819.304.006</b>
2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.150.000.000
2.22.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	650.000.000
2.22.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	500.000.000
2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	669.304.006
2.22.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	669.304.006
<b>2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>4.194.609.482</b>
2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.194.609.482
2.22.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	749.997.408
2.22.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	3.444.612.074
<b>2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>2.213.228.960</b>
2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	754.500.521
2.22.05.1.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	204.500.232

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
2.22.05.1.01.02 Penetapan Cagar Budaya	550.000.289
2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	1.458.728.439
2.22.05.1.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	469.393.500
2.22.05.1.02.04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	989.334.939
<b>2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>450.266.636</b>
2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	450.266.636
2.22.06.1.01.02 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	200.000.000
2.22.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	250.266.636
<b>2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>15.918.844.387</b>
2.24.2.23.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	15.918.844.387
<b>2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>14.016.913.275</b>
2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	726.162.758
2.23.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.927.716
2.23.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	90.546.896
2.23.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86.823.036
2.23.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	442.865.110
2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.067.209.018
2.23.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.588.932.971
2.23.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.433.291.011
2.23.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	44.985.036
2.23.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	177.048.202
2.23.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	177.048.202
2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	244.317.875
2.23.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	47.625.875
2.23.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	196.692.000
2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.200.000
2.23.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.200.000
2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	450.000.000
2.23.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	450.000.000
2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.335.975.422
2.23.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	862.351.000
2.23.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	290.535.000
2.23.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	183.089.422
<b>2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>1.901.931.112</b>
2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	1.619.677.972
2.23.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	139.294.732
2.23.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	229.092.264
2.23.02.1.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	280.000.000
2.23.02.1.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	175.000.000
2.23.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	203.837.736
2.23.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	592.453.240
2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	282.253.140
2.23.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	112.180.700
2.23.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	170.072.440
<b>2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>4.670.088.203</b>
2.24.2.23.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.670.088.203
<b>2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>2.343.693.600</b>
2.24.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	420.168.000
2.24.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	420.168.000
2.24.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.150.671.030
2.24.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.404.430
2.24.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.166.600
2.24.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	67.200.000
2.24.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	999.900.000
2.24.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	418.504.570
2.24.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	418.504.570
2.24.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.350.000
2.24.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.250.000
2.24.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	272.100.000
2.24.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.000.000
<b>2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>1.605.932.348</b>
2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	576.486.970
2.24.02.1.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	200.052.662
2.24.02.1.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	376.434.308
2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	1.029.445.378
2.24.02.1.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	393.591.145
2.24.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	635.854.233
<b>2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>512.996.208</b>
2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	512.996.208
2.24.03.1.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	512.996.208
<b>2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>	<b>207.466.047</b>
2.24.04.1.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	207.466.047
2.24.04.1.01.01 Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	207.466.047
<b>3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>582.288.359.220</b>
<b>3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>124.134.630.355</b>
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	124.134.630.355
<b>3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>49.432.125.431</b>
3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	297.499.325

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
3.25.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125.000.000
3.25.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	57.499.725
3.25.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59.999.800
3.25.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.999.800
3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.948.330.720
3.25.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.047.377.098
3.25.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.825.953.872
3.25.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000
3.25.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.999.750
3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	369.996.095
3.25.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000
3.25.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	94.996.400
3.25.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	174.999.875
3.25.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	49.999.820
3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.716.399.165
3.25.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	149.639.490
3.25.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	79.999.875
3.25.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.144.999.800
3.25.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	210.000.000
3.25.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	131.760.000
3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.974.593.026
3.25.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	314.834.030
3.25.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	174.999.671
3.25.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	209.759.500
3.25.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	110.000.000
3.25.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.164.999.825
3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.839.160.000
3.25.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	147.660.000
3.25.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	191.500.000
3.25.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000.000
3.25.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.146.322.000
3.25.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.146.322.000
3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.156.425.100
3.25.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	319.930.100
3.25.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.091.475.000
3.25.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	245.020.000
3.25.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.500.000.000
3.25.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	6.983.400.000
3.25.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.983.400.000
<b>3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>7.769.998.776</b>
3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	6.784.999.440
3.25.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	6.369.999.822
3.25.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	414.999.618
3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	209.999.926
3.25.02.1.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	209.999.926
3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	774.999.410
3.25.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	219.999.924
3.25.02.1.03.03 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	214.999.655
3.25.02.1.03.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	339.999.831
<b>3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>53.425.945.713</b>
3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	25.249.999.325
3.25.03.1.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	199.999.325
3.25.03.1.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	25.050.000.000
3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	27.410.946.738
3.25.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	27.245.946.988
3.25.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	164.999.750
3.25.03.1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	399.999.750
3.25.03.1.09.02 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	399.999.750
3.25.03.1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	364.999.900
3.25.03.1.10.02 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	364.999.900
<b>3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>7.853.998.274</b>
3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	299.999.550
3.25.04.1.01.01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	149.999.750
3.25.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	149.999.800
3.25.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	149.999.750
3.25.04.1.02.01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	149.999.750
3.25.04.1.04 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	150.000.000
3.25.04.1.04.01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	150.000.000
3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.574.998.974
3.25.04.1.05.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	149.999.800



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
3.25.04.1.05.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	375.000.000
3.25.04.1.05.04 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2.700.000.000
3.25.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	174.999.664
3.25.04.1.05.07 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	174.999.510
3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	3.679.000.000
3.25.04.1.06.01 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.479.000.000
3.25.04.1.06.02 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
<b>3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>2.277.562.244</b>
3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	2.047.738.057
3.25.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	314.202.385
3.25.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	498.535.850
3.25.05.1.01.03 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	249.999.822
3.25.05.1.01.04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	985.000.000
3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	229.824.187
3.25.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	229.824.187
<b>3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>3.374.999.917</b>
3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	624.999.925
3.25.06.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	189.457.904
3.25.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	435.542.021
3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	2.125.000.000
3.25.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	200.000.000
3.25.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	1.925.000.000
3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	624.999.992
3.25.06.1.03.01 Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	126.791.087
3.25.06.1.03.03 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	498.208.905
<b>3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>15.019.115.125</b>
2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	15.019.115.125
<b>3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>4.595.061.465</b>
3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1.544.999.175
3.26.02.1.01.02 Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1.544.999.175
3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.100.062.290
3.26.02.1.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.500.000.000
3.26.02.1.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	600.062.290
3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	750.000.000
3.26.02.1.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	
3.26.02.1.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	750.000.000
3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	200.000.000
3.26.02.1.04.01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	200.000.000
<b>3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>5.700.000.000</b>
3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	5.700.000.000
3.26.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	200.000.000
3.26.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5.500.000.000
<b>3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>3.324.117.892</b>
3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3.324.117.892
3.26.04.1.02.01 Pengembangan Riset	1.051.832.500
3.26.04.1.02.03 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	599.999.537
3.26.04.1.02.08 Perlindungan Hasil Kreativitas	699.999.520
3.26.04.1.02.09 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	600.000.000
3.26.04.1.02.10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	372.286.335
<b>3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>1.399.935.768</b>
3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1.399.935.768
3.26.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	699.967.900
3.26.05.1.01.03 Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	499.967.868
3.26.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200.000.000
<b>3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>150.587.876.285</b>
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNGAN	100.011.869.010
<b>3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>44.735.869.705</b>
3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000
3.27.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.000.000
3.27.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.000.000
3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.750.929.765
3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.235.869.705
3.27.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.515.060.060
3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.900.000.000
3.27.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	300.000.000
3.27.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	750.000.000
3.27.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	850.000.000

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.450.000.000
3.27.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000.000
3.27.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	500.000.000
3.27.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000
3.27.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	100.000.000
3.27.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.200.000.000
3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000
3.27.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000
3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.220.000.000
3.27.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.000.000
3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	550.000.000
3.27.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	600.000.000
3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.284.939.940
3.27.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	800.000.000
3.27.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	700.000.000
3.27.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	784.939.940
<b>3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>32.460.000.000</b>
3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	7.700.000.000
3.27.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	7.500.000.000
3.27.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	200.000.000
3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	24.760.000.000
3.27.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	500.000.000
3.27.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	7.000.000.000
3.27.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	9.260.000.000
3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	8.000.000.000
<b>3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>19.811.976.000</b>
3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	19.811.976.000
3.27.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1.000.000.000
3.27.03.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1.000.000.000
3.27.03.1.01.07 Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	3.200.000.000
3.27.03.1.01.10 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	14.611.976.000
<b>3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>1.250.000.000</b>
3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.250.000.000
3.27.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.150.578.000
3.27.05.1.01.02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	99.422.000
<b>3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>250.000.000</b>
3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000
3.27.06.1.01.03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	250.000.000
<b>3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>1.504.023.305</b>
3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	750.000.000
3.27.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	750.000.000
3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	754.023.305
3.27.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	754.023.305
3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	50.576.007.275
<b>3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>24.401.544.420</b>
3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	227.552.833
3.27.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.001
3.27.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	17.552.832
3.27.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
3.27.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
3.27.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
3.27.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000
3.27.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000
3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.112.868.481
3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.401.544.420
3.27.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	342.732.061
3.27.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	333.592.000
3.27.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.000.000
3.27.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	880.322.266
3.27.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
3.27.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	272.095.314
3.27.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
3.27.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	260.004.952
3.27.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
3.27.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
3.27.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	348.222.000
3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.468.403.190
3.27.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103.366.600
3.27.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	275.923.590
3.27.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.837.000
3.27.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76.250.000
3.27.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	68.400.000
3.27.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	104.400.000
3.27.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	772.226.000
3.27.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
3.27.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.090.202.139
3.27.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
3.27.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	318.070.500
3.27.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	469.980.000
3.27.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
3.27.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.112.551.639
3.27.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	189.600.000
3.27.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.170.386.861
3.27.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	77.700.000
3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	295.535.000
3.27.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
3.27.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	797.151.861
3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	451.808.650
3.27.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	206.880.000
3.27.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	164.340.000
3.27.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
3.27.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
3.27.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000
3.27.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.588.650
<b>3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>11.000.000.000</b>
3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
3.27.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	
3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.500.000.000
3.27.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.500.000.000
3.27.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
3.27.02.1.04.03 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.000.000.000
3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	7.500.000.000
3.27.02.1.05.01 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	5.000.000.000
3.27.02.1.05.02 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	2.500.000.000
3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
3.27.02.1.07.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
3.27.02.1.07.02 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
<b>3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>10.424.462.855</b>
3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	750.000.000
3.27.03.1.01.10 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	750.000.000
3.27.03.1.02 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9.674.462.855
3.27.03.1.02.01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	8.594.253.690
3.27.03.1.02.02 Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1.080.209.165
<b>3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>3.750.000.000</b>
3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.000.000.000
3.27.04.1.01.01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1.000.000.000
3.27.04.1.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
3.27.04.1.01.03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	
3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	250.000.000
3.27.04.1.02.01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	250.000.000
3.27.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	
3.27.04.1.02.03 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	
3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	500.000.000
3.27.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	
3.27.04.1.03.02 Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	
3.27.04.1.03.03 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	500.000.000
3.27.04.1.04 Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.000.000.000
3.27.04.1.04.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	1.000.000.000
3.27.04.1.04.02 Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	
3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan	1.000.000.000
3.27.04.1.05.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	
3.27.04.1.05.02 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	1.000.000.000
<b>3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	
3.27.06.1.03 Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	
3.27.06.1.03.02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	
<b>3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>1.000.000.000</b>
3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	
3.27.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	
3.27.07.1.01.02 Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	
3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
3.27.07.1.02.01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
3.27.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	
3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	1.000.000.000
3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	
3.27.07.1.03.02 Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	500.000.000
3.27.07.1.03.03 Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	500.000.000
3.27.07.1.03.04 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	
<b>3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>165.781.894.655</b>

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN	165.781.894.655
<b>3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>103.537.959.583</b>
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.000.000
3.28.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.000.000
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81.689.251.872
3.28.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77.209.514.872
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.865.417.000
3.28.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.545.320.000
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	69.000.000
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	79.116.000
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	79.116.000
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.750.513.752
3.28.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.133.632.500
3.28.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	183.004.581
3.28.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	465.077.671
3.28.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	968.799.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.212.477.462
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	454.150.100
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.193.944.405
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.135.789.457
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	634.220.000
3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	614.970.000
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	695.755.500
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.542.608.000
3.28.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	941.040.000
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.645.554.494
3.28.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3.645.554.494
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.450.357.403
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	232.140.000
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	288.029.845
3.28.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	930.187.558
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.642.688.600
3.28.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	785.000.000
3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	581.670.000
3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	379.840.000
3.28.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
3.28.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	539.418.600
3.28.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	356.760.000
<b>3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>59.042.178.400</b>
3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	31.572.679.844
3.28.03.1.01.01 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	
3.28.03.1.01.02 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
3.28.03.1.01.03 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	31.572.679.844
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	308.096.133
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	308.096.133
3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.733.684.769
3.28.03.1.03.02 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	423.843.347
3.28.03.1.03.03 Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	588.001.350
3.28.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	421.157.651
3.28.03.1.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	399.999.870
3.28.03.1.03.06 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	500.685.807
3.28.03.1.03.07 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	499.999.657
3.28.03.1.03.08 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	399.999.580
3.28.03.1.03.09 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	499.997.507
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	16.959.941.426
3.28.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	218.715.480
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	455.513.131
3.28.03.1.04.03 Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	552.900.000
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	5.596.065.120
3.28.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	
3.28.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	9.536.737.160
3.28.03.1.04.07 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
3.28.03.1.04.08 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	
3.28.03.1.04.09 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	600.010.535
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.082.941.592
3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	1.426.729.024
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	
3.28.03.1.05.03 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	
3.28.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1.056.213.165
3.28.03.1.05.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	599.999.403
3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	647.409.342
3.28.03.1.06.01 Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	647.409.342
3.28.03.1.06.02 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	
3.28.03.1.06.04 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	
3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1.852.625.026
3.28.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	640.048.534

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
3.28.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	488.772.472
3.28.03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	723.804.020
3.28.03.1.08 Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi	
3.28.03.1.08.01 Penetapan Rencana Pengelolaan Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di Kawasan Hutan	
3.28.03.1.08.02 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani	
3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	884.800.268
3.28.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	300.000.000
3.28.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih	300.000.000
3.28.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih	
3.28.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit	
3.28.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	
3.28.03.1.09.06 Pembangunan Sumber Benih	284.800.268
<b>3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>993.561.911</b>
3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	
3.28.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Conversion On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	
3.28.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	
3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	993.561.911
3.28.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	993.561.911
<b>3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>2.208.194.761</b>
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.208.194.761
3.28.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	955.796.572
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	356.957.167
3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	895.441.022
<b>3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
3.28.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	
3.28.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	
3.28.06.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	
<b>3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>	<b>71.635.779.558</b>
<b>3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>	<b>71.635.779.558</b>
<b>3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>20.663.847.392</b>
3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	895.257.387
3.29.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	818.995.800
3.29.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	50.060.267
3.29.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.922.160
3.29.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.279.160
3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.700.809.399
3.29.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.986.916.063
3.29.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	704.673.336
3.29.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.220.000
3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.660.600.649
3.29.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	158.179.521
3.29.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23.037.500
3.29.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.479.383.628
3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.118.830.284
3.29.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	117.570.000
3.29.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.274.404
3.29.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.493.880
3.29.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	27.000.000
3.29.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	71.760.000
3.29.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	727.732.000
3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	865.578.000
3.29.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
3.29.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.698.000
3.29.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	674.880.000
3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	424.860.823
3.29.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.000.000
3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	356.411.000
3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.449.823
3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	997.910.850
3.29.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	264.280.000
3.29.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	177.000.000
3.29.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	284.989.250
3.29.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	143.040.000
3.29.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	128.601.600
<b>3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN</b>	<b>399.999.791</b>
3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	200.000.475
3.29.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	200.000.475
3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	199.999.316
3.29.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	199.999.316
<b>3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>834.900.078</b>
3.29.03.1.02 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	247.197.348

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
3.29.03.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	247.197.348
3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	282.702.892
3.29.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	282.702.892
3.29.03.1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	299.999.838
3.29.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	299.999.838
3.29.03.1.11 Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan	5.000.000
3.29.03.1.11.01 Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan	5.000.000
<b>3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	<b>553.790.645</b>
3.29.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	553.790.645
3.29.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	348.894.645
3.29.05.1.04.07 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	204.896.000
<b>3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>49.183.241.652</b>
3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	81.920.832
3.29.06.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	81.920.832
3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	102.382.000
3.29.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	102.382.000
3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	48.998.938.820
3.29.06.1.06.06 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	48.998.938.820
<b>3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>46.968.685.607</b>
3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	46.968.685.607
<b>3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>26.001.882.986</b>
3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.002.500
3.30.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	100.000.500
3.30.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.002.000
3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.253.080.163
3.30.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.749.337.187
3.30.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.453.741.976
3.30.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.001.000
3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	937.910.450
3.30.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	198.943.450
3.30.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.002.000
3.30.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	131.805.000
3.30.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	557.160.000
3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.978.859.685
3.30.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.975.000
3.30.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	507.419.823
3.30.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.967.734
3.30.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	301.907.264
3.30.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	71.400.000
3.30.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	124.800.000
3.30.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	125.280.000
3.30.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.750.109.864
3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	976.745.060
3.30.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	947.001.000
3.30.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.744.060
3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.672.000
3.30.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000
3.30.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	408.672.000
3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	844.609.128
3.30.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	459.884.128
3.30.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.300.000
3.30.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	327.425.000
3.30.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	1.492.004.000
3.30.01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1.492.004.000
<b>3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>12.881.309.134</b>
3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	313.391.360
3.30.04.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	313.391.360
3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	11.934.795.413
3.30.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	678.310.700
3.30.04.1.02.02 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	11.256.484.713
3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	633.122.361
3.30.04.1.03.01 Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	232.917.286
3.30.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	400.205.075
<b>3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>1.919.154.460</b>

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1.919.154.460
3.30.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional	499.999.875
3.30.05.1.01.02 Pameran Dagang Lokal	499.903.588
3.30.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor	499.086.769
3.30.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	420.164.228
<b>3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>2.343.250.991</b>
3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	775.916.963
3.30.06.1.01.01 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	187.997.365
3.30.06.1.01.02 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	587.919.598
3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	976.374.500
3.30.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian	976.374.500
3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	590.959.528
3.30.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	590.959.528
<b>3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>3.823.088.036</b>
3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.823.088.036
3.30.07.1.03.01 Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	3.415.371.250
3.30.07.1.03.02 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	97.433.050
3.30.07.1.03.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	310.283.736
<b>3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>4.107.811.635</b>
3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.107.811.635
<b>3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>2.422.626.751</b>
3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	2.422.626.751
3.31.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	194.193.233
3.31.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	245.777.158
3.31.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.982.656.360
<b>3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>538.306.955</b>
3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	538.306.955
3.31.03.1.01.01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	269.820.250
3.31.03.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	268.486.705
<b>3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>1.146.877.929</b>
3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1.146.877.929
3.31.04.1.01.01 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	374.583.635
3.31.04.1.01.02 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	372.293.868
3.31.04.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	400.000.426
<b>3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>	<b>4.052.566.000</b>
2.07.3.32.0.00.02.0000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	4.052.566.000
<b>3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>550.000.000</b>
3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	550.000.000
3.32.02.1.01.01 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	350.000.000
3.32.02.1.01.04 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	200.000.000
<b>3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>1.502.566.000</b>
3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.502.566.000
3.32.03.1.01.02 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	350.000.000
3.32.03.1.01.05 Penyuluhan Transmigrasi	200.000.000
3.32.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi	202.566.000
3.32.03.1.01.13 Pelayanan Kesehatan Transmigran	150.000.000
3.32.03.1.01.17 Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	300.000.000
3.32.03.1.01.18 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	300.000.000
<b>3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>2.000.000.000</b>
3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	2.000.000.000
3.32.04.1.01.01 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	422.726.014
3.32.04.1.01.02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	1.577.273.986
<b>4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>619.717.108.945</b>
<b>4.01 SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>373.014.833.537</b>
4.01.4.01.4.01.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	373.014.833.537
<b>4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>257.474.051.335</b>
4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.072.330.462
4.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	158.200.000
4.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	50.000.000
4.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
4.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	519.796.600
4.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	344.333.862
4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90.018.195.421
4.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	87.689.110.221
4.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	771.120.000
4.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	567.642.820
4.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	216.192.000
4.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	422.380.000
4.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	351.750.380
4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.687.198.726
4.01.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	192.659.020

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
4.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.255.886.821
4.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	543.160.000
4.01.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	314.511.510
4.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	380.981.375
4.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	319.979.750
4.01.01.1.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	319.979.750
4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.344.775.727
4.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.023.116.250
4.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.244.169.296
4.01.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	150.000.000
4.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	150.000.000
4.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.921.474.551
4.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.470.684.250
4.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.385.331.380
4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.134.253.227
4.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.543.611.030
4.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	638.769.010
4.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.938.494.673
4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.165.633.200
4.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	752.000.000
4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.905.495.284
4.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.064.026.110
4.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.126.223.920
4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.089.100.125
4.01.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.283.995.000
4.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.000.000
4.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	691.439.792
4.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.665.333
4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.193.602.222
4.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.075.100.000
4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.285.515.000
4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.832.987.222
4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.563.882.884
4.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.710.299.612
4.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000
4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.454.796.820
4.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	500.062.800
4.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.953.550.652
4.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.900.173.000
4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	22.363.320.727
4.01.01.1.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.945.815.700
4.01.01.1.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	575.150.862
4.01.01.1.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	358.800.000
4.01.01.1.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	19.483.554.165
4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	6.026.111.017
4.01.01.1.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4.144.324.832
4.01.01.1.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	861.011.616
4.01.01.1.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.020.774.569
4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	2.221.429.047
4.01.01.1.13.01 Penyiapan Materi Pimpinan	1.173.447.547
4.01.01.1.13.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	160.000.000
4.01.01.1.13.03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	887.981.500
4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	22.439.872.000
4.01.01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1.347.000.000
4.01.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.892.872.000
4.01.01.1.14.03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	200.000.000
<b>4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>9.279.732.500</b>
4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4.734.982.650
4.01.02.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	1.021.253.000
4.01.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2.913.729.650
4.01.02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan	800.000.000
4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	4.544.749.850
4.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	900.000.000
4.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1.314.749.850
4.01.02.1.02.03 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	500.000.000
4.01.02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	980.000.000
4.01.02.1.02.05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	850.000.000
<b>4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>	<b>8.301.612.608</b>
4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	4.250.185.585
4.01.03.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1.699.999.897
4.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1.099.999.023
4.01.03.1.01.03 Fasilitasi Penataan Wilayah	1.450.186.665
4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	2.220.456.201
4.01.03.1.02.01 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	369.999.963
4.01.03.1.02.02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	1.099.999.923
4.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	750.456.315
4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1.830.970.822
4.01.03.1.03.01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	449.999.057
4.01.03.1.03.02 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	931.155.765



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
4.01.03.1.03.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	449.816.000
<b>4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>59.114.289.058</b>
4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	50.270.747.542
4.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	1.020.000.000
4.01.04.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	49.250.747.542
4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	3.436.070.207
4.01.04.1.02.01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1.250.189.264
4.01.04.1.02.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	885.999.703
4.01.04.1.02.03 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1.299.881.240
4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	5.407.471.309
4.01.04.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1.470.487.980
4.01.04.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.251.441.315
4.01.04.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	2.685.542.014
<b>4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	<b>10.211.692.150</b>
4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	8.494.764.437
4.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	6.016.584.715
4.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	437.893.886
4.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	736.948.805
4.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	1.303.337.031
4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	1.716.927.713
4.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.300.530.620
4.01.05.1.02.02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	416.397.093
<b>4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>7.410.131.513</b>
4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	3.459.027.559
4.01.06.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2.190.701.532
4.01.06.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1.268.326.027
4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	2.049.998.165
4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1.149.998.929
4.01.06.1.02.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	449.999.576
4.01.06.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	449.999.660
4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1.901.105.789
4.01.06.1.03.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	299.998.180
4.01.06.1.03.02 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	303.013.420
4.01.06.1.03.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	749.124.052
4.01.06.1.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	398.999.894
4.01.06.1.03.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	149.970.243
<b>4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>9.213.598.716</b>
4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.971.429.516
4.01.07.1.01.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	950.000.395
4.01.07.1.01.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.421.429.185
4.01.07.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	599.999.936
4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2.200.000.000
4.01.07.1.02.01 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	700.000.000
4.01.07.1.02.02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000.000
4.01.07.1.02.03 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	500.000.000
4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3.042.169.200
4.01.07.1.03.01 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	671.057.890
4.01.07.1.03.02 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.346.090.782
4.01.07.1.03.03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1.025.020.528
<b>4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>5.435.518.317</b>
4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.103.258.655
4.01.08.1.01.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	301.409.805
4.01.08.1.01.02 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	301.848.850
4.01.08.1.01.03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	500.000.000
4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4.332.259.662
4.01.08.1.02.01 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	311.093.814
4.01.08.1.02.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	256.401.590
4.01.08.1.02.03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	3.764.764.258
<b>4.01.12 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA BARAT</b>	<b>6.574.207.340</b>
4.01.12.4.01 Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus	6.574.207.340
4.01.12.4.01.01 Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	4.807.156.215
4.01.12.4.01.02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	1.767.051.125
4.01.12.4.03 Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi	
4.01.12.4.03.03 Penyediaan Bantuan Akhir Studi	
4.01.12.4.03.05 Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	
<b>4.02 SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>246.702.275.408</b>
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT	162.178.907.646
<b>4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>81.426.584.217</b>
4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	429.911.980
4.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	162.215.990
4.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	106.850.000
4.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	106.850.000
4.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.995.990
4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.719.993.240

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
4.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.709.348.426
4.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.217.856.974
4.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	415.206.655
4.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	377.581.185
4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	945.330.000
4.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	945.330.000
4.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	370.515.600
4.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	370.515.600
4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.068.955.308
4.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.107.094.686
4.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	683.878.652
4.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	694.535.970
4.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	259.200.000
4.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	490.776.000
4.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.833.470.000
4.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
4.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.004.168.739
4.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	623.214.240
4.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
4.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	380.954.499
4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.194.722.000
4.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	346.600.000
4.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
4.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	417.250.000
4.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	430.872.000
4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	48.675.607.350
4.02.01.1.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	47.745.725.316
4.02.01.1.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	929.882.034
4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	1.017.380.000
4.02.01.1.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD	1.017.380.000
4.02.01.1.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
4.02.01.1.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	
<b>4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>78.634.093.429</b>
4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	11.823.373.400
4.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.890.080.600
4.02.02.1.01.02 Pembahasan Rancangan Perda	2.280.960.600
4.02.02.1.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2.280.960.600
4.02.02.1.01.04 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	4.065.611.600
4.02.02.1.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD	305.760.000
4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	5.870.906.125
4.02.02.1.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	390.150.385
4.02.02.1.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	385.668.960
4.02.02.1.02.03 Pembahasan APBD	2.391.872.030
4.02.02.1.02.04 Pembahasan Perubahan APBD	2.320.266.300
4.02.02.1.02.05 Pembahasan Laporan Semester	
4.02.02.1.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	382.948.450
4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	8.448.042.120
4.02.02.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.093.199.175
4.02.02.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	962.146.080
4.02.02.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.234.320.774
4.02.02.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.081.200.284
4.02.02.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1.158.357.467
4.02.02.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	415.182.875
4.02.02.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	2.155.984.000
4.02.02.1.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	347.651.465
4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	6.232.201.000
4.02.02.1.04.01 Orientasi DPRD	
4.02.02.1.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	4.190.201.000
4.02.02.1.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	896.000.000
4.02.02.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.146.000.000
4.02.02.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
4.02.02.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
4.02.02.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	
4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	37.095.018.264
4.02.02.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	2.323.164.000
4.02.02.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
4.02.02.1.05.03 Pelaksanaan Reses	34.771.854.264
4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
4.02.02.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD	
4.02.02.1.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD	
4.02.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	
4.02.02.1.07.01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	
4.02.02.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	
4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	9.164.552.520
4.02.02.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.743.574.000
4.02.02.1.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
4.02.02.1.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
4.02.02.1.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5.420.978.520
<b>4.02.05 PROGRAM SEKRETARIAT DPRD PAPUA BARAT</b>	<b>2.118.230.000</b>
4.02.05.4.01 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	2.118.230.000
4.02.05.4.01.02 Penyediaan Dana General Check-up Pimpinan dan Anggota DPR PB	2.118.230.000
4.02.05.4.01.03 Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	
4.02.05.4.01.06 Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	
4.02.05.4.01.08 Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	
4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	84.523.367.762
<b>4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>19.838.394.062</b>
4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.557.704
4.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.468.720
4.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	20.420.856
4.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.191.660
4.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.476.468
4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.480.656.323
4.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.440.189.755
4.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.055.728
4.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20.410.840
4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	418.253.302
4.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	418.253.302
4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.999.997
4.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.999.997
4.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
4.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
4.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.707.926.736
4.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
4.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
4.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.707.926.736
4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
4.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
4.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
4.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
4.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
4.02.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	
4.02.01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	
<b>4.02.06 PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROV. PAPUA BARAT</b>	<b>64.684.973.700</b>
4.02.06.4.01 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP	29.381.559.288
4.02.06.4.01.01 Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	4.500.190.000
4.02.06.4.01.02 Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	24.881.369.288
4.02.06.4.02 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban	35.303.414.412
4.02.06.4.02.01 Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota	20.993.917.964
4.02.06.4.02.02 Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan	2.999.920.000
4.02.06.4.02.03 Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi	2.996.188.000
4.02.06.4.02.05 Penyusunan Peraturan MRP	1.170.006.800
4.02.06.4.02.06 Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	7.143.381.648
<b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>3.330.051.628.642</b>
<b>5.01 PERENCANAAN</b>	<b>44.593.115.434</b>
5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	44.593.115.434
<b>5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>22.919.819.685</b>
5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.310.289
5.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	146.609.608
5.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	68.416.285
5.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	60.584.425
5.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	73.152.000
5.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	102.512.871
5.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.035.100
5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.339.041.055
5.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.593.115.434
5.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	373.080.000
5.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	142.753.023
5.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
5.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	230.092.598
5.01.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.149.065.490
5.01.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	41.419.409
5.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
5.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	79.172.851
5.01.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	78.472.090
5.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	169.215.360
5.01.01.1.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
5.01.01.1.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
5.01.01.1.05.08 Pemindahan Tugas ASN	
5.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	88.500.000
5.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	282.101.780
5.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	410.184.000
5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.400.341.126
5.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.795.500
5.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	167.331.541

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
5.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.156.661
5.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.948.922
5.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.018.000
5.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.000.000
5.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	
5.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	140.198.940
5.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	932.352.000
5.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	151.881.990
5.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	859.657.572
5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	258.350.728
5.01.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
5.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
5.01.01.1.07.03 Pengadaan Alat Besar	
5.01.01.1.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
5.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	
5.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	226.060.728
5.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	32.290.000
5.01.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	
5.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
5.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
5.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.694.851.645
5.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000
5.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	387.240.000
5.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.200.000
5.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.279.411.645
5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	577.859.352
5.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	172.825.000
5.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000
5.01.01.1.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
5.01.01.1.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
5.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	
5.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.367.214
5.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	226.307.808
5.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
5.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
5.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.321.000
5.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.038.330
5.01.01.1.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
<b>5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>9.869.833.785</b>
5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.915.362.172
5.01.02.1.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
5.01.02.1.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
5.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	349.999.772
5.01.02.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	799.999.998
5.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1.906.447.699
5.01.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.858.914.703
5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.754.831.913
5.01.02.1.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-
5.01.02.1.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	599.999.954
5.01.02.1.02.03 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.154.831.959
5.01.02.1.02.04 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	
5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2.199.639.700
5.01.02.1.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	395.594.000
5.01.02.1.03.02 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	
5.01.02.1.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.804.045.700
5.01.02.1.03.04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
5.01.02.1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
5.01.02.1.04.01 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
5.01.02.1.04.02 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
5.01.02.1.04.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	
<b>5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>11.803.461.964</b>
5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3.999.999.738
5.01.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	752.939.433
5.01.03.1.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	334.533.648
5.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	616.089.404
5.01.03.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	336.650.931
5.01.03.1.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	338.029.395
5.01.03.1.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	373.081.583
5.01.03.1.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	909.255.133
5.01.03.1.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	339.420.211
5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3.891.964.620
5.01.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	
5.01.03.1.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
5.01.03.1.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1.170.110.000
5.01.03.1.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1.999.999.620
5.01.03.1.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
5.01.03.1.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
5.01.03.1.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	219.043.000
5.01.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	502.812.000
5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3.911.497.606
5.01.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	445.879.230
5.01.03.1.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	315.505.638
5.01.03.1.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1.200.134.051
5.01.03.1.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	350.000.481
5.01.03.1.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	401.650.386
5.01.03.1.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	300.001.058
5.01.03.1.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	400.000.341
5.01.03.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	498.326.421
<b>5.02 KEUANGAN</b>	<b>3.164.064.278.062</b>
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.107.691.856.310
<b>5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>210.766.309.259</b>
5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.459.660
5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123.356.000
5.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
5.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
5.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.103.660
5.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	192.318.842.809
5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	175.273.449.619
5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.295.750.008
5.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
5.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	749.643.182
5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
5.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.273.420.750
5.02.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
5.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
5.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
5.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
5.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.635.420.750
5.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.638.000.000
5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.196.030.780
5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	232.500.000
5.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.525.520.780
5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.319.510.000
5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	339.600.000
5.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.288.200.000
5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.490.700.000
5.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.416.615.700
5.02.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.416.615.700
5.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	
5.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
5.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
5.02.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	
5.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
5.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.419.790.000
5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	126.300.000
5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	443.490.000
5.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	850.000.000
5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.968.149.560
5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.712.200.000
5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
5.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	
5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
5.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
5.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.087.089.560
5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
5.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.168.860.000
<b>5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>2.893.325.547.051</b>
5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.056.750.983
5.02.02.1.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	290.933.540

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
5.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	314.890.840
5.02.02.1.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	244.978.752
5.02.02.1.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
5.02.02.1.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	296.723.000
5.02.02.1.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	308.565.390
5.02.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	704.591.616
5.02.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.839.316.865
5.02.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
5.02.02.1.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
5.02.02.1.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	1.056.750.980
5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.999.965.824
5.02.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	499.967.440
5.02.02.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	499.999.836
5.02.02.1.02.04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	499.999.884
5.02.02.1.02.05 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	
5.02.02.1.02.06 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	499.998.664
5.02.02.1.02.08 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	
5.02.02.1.02.09 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	
5.02.02.1.02.10 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
5.02.02.1.02.11 Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	
5.02.02.1.02.12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	
5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	3.999.993.272
5.02.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
5.02.02.1.03.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	300.000.000
5.02.02.1.03.05 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	999.993.272
5.02.02.1.03.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	300.000.000
5.02.02.1.03.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	190.000.000
5.02.02.1.03.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1.500.000.000
5.02.02.1.03.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	710.000.000
5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.649.258.271
5.02.02.1.04.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
5.02.02.1.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	999.998.491
5.02.02.1.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	499.261.418
5.02.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
5.02.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	1.149.998.362
5.02.02.1.04.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	
5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.879.619.578.701
5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.779.619.578.701
5.02.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100.000.000.000
<b>5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>3.600.000.000</b>
5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.600.000.000
5.02.03.1.01.01 Penyusunan Standar Harga	600.000.000
5.02.03.1.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
5.02.03.1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	
5.02.03.1.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	475.710.000
5.02.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	459.300.000
5.02.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	430.350.000
5.02.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	
5.02.03.1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	
5.02.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	417.380.000
5.02.03.1.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	510.300.000
5.02.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	343.850.000
5.02.03.1.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	363.110.000
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	56.372.421.752
<b>5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>41.138.331.543</b>
5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	929.865.678
5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.709.178
5.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	79.607.000
5.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	124.021.500
5.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	665.528.000
5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.190.083.957
5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.515.742.799
5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.499.636.158
5.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	76.170.000
5.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	98.535.000
5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.119.421.340

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
5.02.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	400.000.000
5.02.01.1.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
5.02.01.1.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	300.000.000
5.02.01.1.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah	
5.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	419.421.340
5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.857.046.730
5.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	250.050.000
5.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	404.514.000
5.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.312.700.730
5.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.603.522.000
5.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80.280.000
5.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	205.980.000
5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.693.931.021
5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	96.210.000
5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	211.306.981
5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	595.422.040
5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	42.000.000
5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	748.992.000
5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.147.579.892
5.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	300.016.000
5.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	497.300.392
5.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.350.263.500
5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.278.464.806
5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.400.000
5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.239.064.806
5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	921.938.119
5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	349.679.950
5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	168.670.000
5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	403.588.169
<b>5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>2.657.210.349</b>
5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	405.152.550
5.02.02.1.02.01 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	405.152.550
5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.002.017.949
5.02.02.1.03.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1.002.017.949
5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	300.000.000
5.02.02.1.04.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	300.000.000
5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	950.039.850
5.02.02.1.05.02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah	600.039.850
5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	350.000.000
<b>5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>12.576.879.860</b>
5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12.576.879.860
5.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	486.280.000
5.02.04.1.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.001.885.557
5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	477.320.000
5.02.04.1.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2.199.100.000
5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	351.018.466
5.02.04.1.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	871.536.180
5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	5.620.447.087
5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah	274.981.650
5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	891.432.390
5.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	402.878.530
<b>5.03 KEPEGAWAIAN</b>	<b>39.738.558.212</b>
5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	39.738.558.212
<b>5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>24.299.874.491</b>
5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	236.380.886
5.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.376.826
5.03.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	79.415.315
5.03.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	88.788.745
5.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.800.000
5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.238.475.790
5.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.738.558.212
5.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.340.451.103
5.03.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	108.403.160
5.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	51.063.315
5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.902.814.647
5.03.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	350.668.150
5.03.01.1.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	886.405.392
5.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	134.565.000
5.03.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	531.176.105
5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.958.674.335
5.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.091.875
5.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000
5.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000
5.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	135.720.000
5.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.348.559.600
5.03.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	664.415.510
5.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	627.887.350
5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.431.303.333

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
5.03.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	894.140.000
5.03.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	537.163.333
5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	997.165.500
5.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.050.000
5.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	315.830.000
5.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	676.285.500
5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	535.060.000
5.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	360.000.000
5.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
5.03.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	175.060.000
<b>5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>15.438.683.721</b>
5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	4.922.257.846
5.03.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1.504.519.845
5.03.02.1.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2.584.006.188
5.03.02.1.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	700.003.660
5.03.02.1.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	133.728.153
5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	3.543.997.554
5.03.02.1.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	1.044.823.225
5.03.02.1.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1.068.606.175
5.03.02.1.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	1.430.568.154
5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	5.515.842.434
5.03.02.1.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	329.770.800
5.03.02.1.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	4.450.000.159
5.03.02.1.03.05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	349.535.900
5.03.02.1.03.06 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	386.535.575
5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.456.585.887
5.03.02.1.04.01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	199.749.200
5.03.02.1.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	284.206.000
5.03.02.1.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	98.430.576
5.03.02.1.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	374.199.977
5.03.02.1.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	500.000.134
<b>5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>51.887.468.702</b>
5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	51.887.468.702
<b>5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>47.458.022.025</b>
5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	205.221.480
5.04.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.416.300
5.04.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	52.415.100
5.04.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.735.750
5.04.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.654.330
5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.475.789.182
5.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.475.789.182
5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.584.362.645
5.04.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.783.214.480
5.04.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	516.886.165
5.04.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	284.262.000
5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.219.001.808
5.04.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	379.590.000
5.04.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	248.870.000
5.04.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	428.591.308
5.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	720.012.500
5.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	49.950.000
5.04.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	384.500.000
5.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.007.488.000
5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	918.274.500
5.04.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	772.202.000
5.04.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	146.072.500
5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.021.245.505
5.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.565.000
5.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	549.189.505
5.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	454.491.000
5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.617.131.905
5.04.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.465.970.505
5.04.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	929.271.400
5.04.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.221.890.000
5.04.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	18.416.995.000
5.04.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	18.416.995.000
<b>5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>4.429.446.677</b>
5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	1.500.159.448
5.04.02.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	375.002.956
5.04.02.1.01.02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	375.005.507
5.04.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	375.038.172
5.04.02.1.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	375.112.813
5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.929.287.229



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
5.04.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	463.616.418
5.04.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	400.002.000
5.04.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	371.044.226
5.04.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	300.974.870
5.04.02.1.02.05 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	400.000.174
5.04.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	251.522.700
5.04.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	742.126.841
5.04.02.1.02.08 Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
<b>5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>14.394.562.476</b>
5.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	14.394.562.476
<b>5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>11.236.895.963</b>
5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152.922.842
5.05.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
5.05.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	62.030.482
5.05.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
5.05.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	45.446.980
5.05.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
5.05.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.445.380
5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.714.702.217
5.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.394.569.216
5.05.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
5.05.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
5.05.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
5.05.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.787.920
5.05.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
5.05.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	31.785.081
5.05.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	256.560.000
5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	925.188.315
5.05.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
5.05.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	121.041.215
5.05.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
5.05.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
5.05.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	200.147.100
5.05.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	604.000.000
5.05.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
5.05.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.132.762.589
5.05.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
5.05.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.118.574
5.05.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.749.805
5.05.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.431.632
5.05.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36.000.000
5.05.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	
5.05.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.980.000
5.05.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.881.482.578
5.05.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
5.05.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.720.000
5.05.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.720.000
5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.600.000
5.05.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000
5.05.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
5.05.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	79.600.000
5.05.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
5.05.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000
<b>5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>3.157.666.513</b>
5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	994.362.132
5.05.02.1.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	
5.05.02.1.01.04 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	496.392.560
5.05.02.1.01.13 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	497.969.572
5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
5.05.02.1.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
5.05.02.1.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
5.05.02.1.02.05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	680.592.030
5.05.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	299.977.272
5.05.02.1.03.06 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	
5.05.02.1.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	380.614.758
5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.482.712.351
5.05.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	297.565.000
5.05.02.1.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	871.367.563
5.05.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	313.779.788
<b>5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG</b>	<b>15.373.645.756</b>

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH	15.373.645.756
<b>5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>11.610.994.776</b>
5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	158.774.500
5.07.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.261.000
5.07.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	39.503.500
5.07.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.010.000
5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.297.100.332
5.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.673.645.756
5.07.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.623.454.576
5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	293.508.000
5.07.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	125.058.000
5.07.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	168.450.000
5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.440.228.453
5.07.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	161.370.500
5.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.016.064.000
5.07.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	262.793.953
5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.411.315.925
5.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.705.000
5.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	443.500.625
5.07.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	257.651.730
5.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	630.458.570
5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.010.067.566
5.07.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	826.093.250
5.07.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	907.814.316
5.07.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76.050.000
5.07.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.110.000
<b>5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	<b>3.762.650.980</b>
5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3.762.650.980
5.07.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	816.648.000
5.07.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	620.699.980
5.07.02.1.01.04 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	251.230.000
5.07.02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.074.073.000
<b>6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>48.771.742.550</b>
<b>6.01 INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>48.771.742.550</b>
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	48.771.742.550
<b>6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>28.046.508.178</b>
6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	285.135.421
6.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.574.671
6.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.380.750
6.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.180.000
6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.086.091.695
6.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.271.742.550
6.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	523.400.000
6.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	264.891.770
6.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.057.375
6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.836.401.060
6.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	199.400.060
6.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.291.185.000
6.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	222.900.000
6.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	122.916.000
6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.798.776.896
6.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.830.000
6.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	248.250.000
6.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	330.821.350
6.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	86.250.000
6.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36.000.000
6.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	30.091.546
6.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.036.534.000
6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.273.643.106
6.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000
6.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	183.450.000
6.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.075.193.106
6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	766.460.000
6.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	280.000.000
6.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	486.460.000
<b>6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>20.261.254.372</b>
6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	17.330.578.392
6.01.02.1.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.336.080.000
6.01.02.1.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.494.960.000
6.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja	1.482.120.000
6.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan	140.070.000
6.01.02.1.01.05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4.694.498.000
6.01.02.1.01.06 Kerjasama Pengawasan Internal	2.225.806.450
6.01.02.1.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	957.043.942
6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2.930.675.980
6.01.02.1.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	430.935.980
6.01.02.1.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2.499.740.000
<b>6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>463.980.000</b>
6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	133.380.000

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
6.01.03.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	133.380.000
6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	330.600.000
6.01.03.1.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	91.200.000
6.01.03.1.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	239.400.000
<b>8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>147.485.933.491</b>
<b>8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>147.485.933.491</b>
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	147.485.933.491
<b>8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>21.018.986.172</b>
8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.620.011.000
8.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000
8.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	55.000.000
8.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100.000.000
8.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000
8.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.290.011.000
8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.878.187.975
8.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.460.814.756
8.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.212.861.869
8.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000
8.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.511.350
8.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.000.000
8.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.000.000
8.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000
8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	779.424.350
8.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	214.228.350
8.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	51.156.000
8.01.01.1.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	19.700.000
8.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	243.694.000
8.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250.646.000
8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.822.744.647
8.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.996.540
8.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	270.988.472
8.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000
8.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.451.759.635
8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	578.909.390
8.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	578.909.390
8.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.996.850
8.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.996.850
8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.139.711.960
8.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	195.000.000
8.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
8.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	799.971.960
8.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	144.740.000
<b>8.01.02 PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>3.288.468.000</b>
8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.288.468.000
8.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3.038.468.000
8.01.02.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
8.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250.000.000
<b>8.01.03 PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	<b>6.517.005.301</b>
8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	6.517.005.301
8.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	856.617.500
8.01.03.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.160.387.801
8.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500.000.000
<b>8.01.04 PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>111.663.542.018</b>
8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	111.663.542.018
8.01.04.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	698.866.000
8.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	110.616.108.018
8.01.04.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	348.568.000
<b>8.01.05 PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	<b>508.955.000</b>
8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	508.955.000
8.01.05.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	508.955.000
<b>8.01.06 PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>4.488.977.000</b>

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4.488.977.000
8.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	491.970.000
8.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	997.007.000
8.01.06.1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	3.000.000.000